



PROFIL GENDER DAN ANAK TAHUN 2018



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU**



**Hj. FORITHA RAMADHANI WATI, SE.,M.Si
NIP. 19691128 199303 2 006**

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

EDITOR

Sekretaris
Bidang Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

PENULIS

Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender
Seksi Penyediaan Layanan Data, Penyuluhan, Edukasi
Gender dan Anak

PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA

Seksi Penyediaan Layanan Data, Penyuluhan, Edukasi
Gender dan Anak

DITERBITKAN OLEH

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Informasi Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

Sesuai Undang undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi mempunyai 6 sub urusan yaitu : Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak.

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 adalah 1.999.539 jiwa, terdiri dari 1.025.729 (51 %) laki-laki dan 973.810 (49 %) perempuan dengan jumlah Penduduk terbanyak berada di Kota Bengkulu yang mencapai 368.784 Jiwa (18,44%) dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Lebong, dengan jumlah penduduk 112.900 (5,65%).

Jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 89,19 % sedangkan kepala keluarga perempuan sebanyak 10,81 %.

Bila dilihat dari pendidikan, jumlah penduduk dengan pendidikan akhir Tamat SD/Sederajat menduduki angka tertinggi yaitu sebanyak 480.286 orang (24,02%) sedangkan penduduk dengan pendidikan akhir Strata III jumlahnya paling sedikit, yaitu sebanyak 380 orang (0,02%).

Jumlah anak terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 121.308 orang (18,47 %) Sedangkan jumlah anak paling sedikit ada di Kabupaten Lebong, yaitu berjumlah 35.246 orang (5,37 %).

Persentase anak yang memiliki akta kelahiran sebanyak 596.105 orang (90,77 %) dan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 60.583 orang (9,23 %).

Angka partisipasi kasar SD yang sangat tinggi lebih dari 100 % baik laki-laki maupun perempuan. APK SMP dan SMA mendekati 100 %, sedangkan APK Perguruan Tinggi hanya 26,97 % untuk laki-laki dan 38,22 % untuk perempuan.

Angka Partisipasi Murni SD yang paling tinggi mendekati 100, yaitu 98,50% untuk laki-laki dan 98,76% untuk perempuan. Sedang APM yang paling rendah adalah APM Perguruan Tinggi dimana 18,72% untuk laki-laki dan 25,14% untuk perempuan

Angka partisipasi sekolah tertinggi berada di umur 7-12, dimana APS laki-laki 99,84% dan Perempuan 99,90%. Dan umur 13-15, yaitu untuk laki-laki 96,42% dan perempuan 98,37%. APS terendah ada di umur 5-6, yaitu 22,69 % untuk laki-laki dan 30,45 untuk perempuan.

Jumlah anak usia sekolah (SD s.d SMA/Kejuruan) terbanyak berada di Bengkulu Utara, yaitu berjumlah 56.063 orang (16,48%) dengan rincian jumlah anak usia sekolah laki-laki sebanyak 28.848 orang dan anak perempuan sebanyak 27.215 orang. Sedangkan jumlah anak usia sekolah (SD s.d SMA/Kejuruan) paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu berjumlah 18.939 orang (5,57%) dengan rincian jumlah anak usia sekolah laki-laki sebanyak 9.548 orang dan anak perempuan sebanyak 9.391 orang.

Jumlah pendidik dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas/kejuruan berjumlah 27.552 orang dengan rincian laki-laki 9.040 orang dan perempuan sebanyak 18.512 orang.

Lembaga Pendidikan dari Tingkat Sekolah Dasar s.d Sekolah Menengah Atas/Kejuruan yang paling banyak berada di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sebanyak 339 lembaga pendidikan

Jumlah tamatan tingkat Sekolah Dasar sebanyak 69.187 orang, dengan rincian tamatan laki-laki sebanyak 37.444 orang dan tamatan perempuan sebanyak 31.743 orang.

Jumlah tamatan tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 32.000 orang, dengan rincian tamatan laki-laki sebanyak 13.068 orang dan tamatan perempuan 18.932 orang.

Jumlah tamatan tingkat Sekolah Menengah Atas sebanyak 9.317 orang, dengan rincian tamatan laki-laki sebanyak 4.513 orang dan tamatan perempuan 4.809 orang.

Jumlah tamatan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 7.919 orang, dengan rincian tamatan laki-laki sebanyak 4.715 orang dan tamatan perempuan 3.204 orang.

Jumlah penyandang disabilitas tunggal sebanyak 1322 orang, yang terdiri penyandang disabilitas tunggal laki-laki sebanyak 806 orang (60,97%) dan Penyandang disabilitas tunggal perempuan sebanyak 516 orang (39,03%).

Jumlah anak terlantar sebanyak 865 orang, yang terdiri laki-laki sebanyak 475 orang (54,91%) dan perempuan sebanyak 390 orang (45,09%).

Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin di Provinsi Bengkulu, yaitu berjumlah 459.993 dengan rincian kepala rumah tangga perempuan sebanyak 223.102 (48,50%) dan kepala rumah tangga laki-laki sebanyak 236.891 (51,50%).

Jumlah Pelaku Industri Kecil Agro sebanyak 2.417 orang, yang terdiri laki-laki sebanyak 2021 orang (83,62%) dan perempuan sebanyak 396 orang (16,38%).

Jumlah IKM sebanyak 5.582 orang, yang terdiri laki-laki sebanyak 4.203 orang (75,30%) dan perempuan sebanyak 1379 orang (24,70%).

keterwakilan perempuan dilembaga legislatif Provinsi Bengkulu hanya 17,78 % yaitu sebanyak 45 orang dari total jumlah anggota DPRD 267 orang

Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebanyak 222 orang, sedangkan jumlah anak berhadapan dengan hukum sebanyak 431 orang dengan rincian, laki-laki sebanyak 429 orang dan perempuan sebanyak 2 orang.

Angka Kematian Neonatal di Provinsi Bengkulu sebesar 6 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi sebesar 7 per 1000 kelahiran hidup, angka Kematian Balita sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup, dan angka kematian Ibu sebesar 111 per 100.000 kelahiran hidup.

Total kasus gizi buruk sebanyak 55 orang, dengan rincian 32 orang laki-laki dan 23 orang perempuan.

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.B.1	Peta Provinsi Bengkulu	6
Grafik 2.C.1	Jumlah ASN DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2018	15
Grafik 3.A.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2014 s.d 2018	20
Grafik 3.A.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018	21
Grafik 3.A.3	Persentase Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2018	21
Grafik 3.A.4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota Tahun 2018	22
Grafik 3.A.5	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota Tahun 2018	23
Grafik 3.A.6	Jumlah Anak Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota Tahun 2018	24
Grafik 3.A.7	Persentase Anak yang Memiliki Akta dan Belum Memiliki Akta	25
Grafik 3.B.1	Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	27
Grafik 3.B.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2018	28
Grafik 3.B.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 5 s.d 24 Tahun Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	29

Grafik 3.B.4	Jumlah Anak Sekolah Dasar (SD) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	30
Grafik 3.B.5	Jumlah Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	31
Grafik 3.B.6	Jumlah Anak Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	31
Grafik 3.B.7	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	32
Grafik 3.B.8	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	33
Grafik 3.B.9	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	33
Grafik 3.B.10	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	34
Grafik 3.B.11	Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	35
Grafik 3.B.12	Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	36
Grafik 3.B.13	Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	37
Grafik 3.B.14	Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	38

Grafik 3.B.15	Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018	39
Grafik 3.B.16	Jumlah Tamatan Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018	40
Grafik 3.B.17	Jumlah Tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018	41
Grafik 3.B.18	Jumlah Tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018	42
Grafik 3.B.19	Jumlah Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018	43
Grafik 3.C.1	Jumlah Penyandang Disabilitas Tunggal Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	44
Grafik 3.C.2	Jumlah Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	45
Grafik 3.C.3	Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	46
Grafik 3.D.1	Tingkat Angkatan Kerja Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	47
Grafik 3.D.2	Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin	48
Grafik 3.D.3	Jumlah Pelaku Industri Kecil Agro Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	48
Grafik 3.D.4	Jumlah IKM Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	49

Grafik 3.E.1	Jumlah Anggota Legislatif Provinsi Bengkulu Menurut Jenis Kelamin Periode 2019-2024	50
Grafik 3.E.2	Persentase ASN yang Menduduki Eselon Tahun 2018	53
Grafik 3.F.1	AKN, AKB, AKBA, dan AKI Tahun 2018	56
Grafik 4 C I	Jumlah Laporan dan Penyelesaian Kasus KDRT Tahun 2018	66
Grafik 4 C 2	Jumlah Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak Tahun 2018	67
Grafik 4 C 3	Jumlah Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak Tahun 2019 (s.d Juni 2019)	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.B.1	Luas Wilayah	7
Table.3.1	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018	17
Table.3.2	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018	18
Table.3.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018	19
Tabel 3.A.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Tahun 2018	24
Tabel 3.E.1	Jumlah Pengurus Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 3.E.2	Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	52
Tabel.3.F.1	Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Bayi Lahir Mati Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018	54
Tabel.3.F.2	Jumlah Gizi Buruk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018	58

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sumber Data	2
D. Sistematika Penyajian	3
BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI BENGKULU	4
A. Sejarah Provinsi Bengkulu	4
B. Letak Geografis	5
C. Pemerintahan	8
BAB III PROFIL GENDER DAN ANAK	16
A. Kependudukan	20
B. Pendidikan	26
C. Sosial	42
D. Ekonomi	44
E. Politik dan Pengambilan Keputusan	47
F. Kesehatan	51
BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	57
A. Perempuan Berhadapan Hukum	59
B. Anak Berhadapan Hukum	60
C. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	62

BAB VI PERANGKAT HUKUM DAN KELEMBAGAAN	66
A. Perangkat Hukum	66
B. Kelembagaan	72
BAB VII PENUTUP	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Gender secara empiris dikembangkan pertamakali oleh Margaret Mead, seorang antropologi dari Amerika. Mead melakukan penelitian pada masyarakat primitif di Papua Nugini pada tahun 1932. Kesimpulan penelitian Mead menunjukkan bahwa perbedaan kepribadian perilaku antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat universal, tetapi ditentukan oleh kebudayaan, sejarah, dan struktur sosial masyarakat tertentu. Meskipun pada waktu itu belum mempergunakan istilah "gender", tetapi hasil penelitian Mead dianggap sebagai penelitian yang pertama mempermasalahkan gender.

Terkait dengan konsep jenis kelamin dan gender, sosiolog dari Inggris bernama Ann Oakley yang pertama kali membedakan antara konsep jenis kelamin dan gender pada tahun 1972. Menurut Oakley, jenis kelamin merujuk pada perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis, sementara gender merupakan perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan jenis kelamin. Sehingga gender diartikan sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan.

Terkait konsep gender, tidak terlepas dari konsep kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan dari merekonstruksi konsep gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender. Dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya di dapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Keduanya mempunyai hak yang sama dalam akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan. Yang pada akhirnya laki-laki dan perempuan akan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pembangunan menuju kesetaraan gender adalah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Semua sektor pembangunan, baik pusat maupun daerah harus memberikan perhatian dan dukungan dalam proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sebagaimana yang tertuang dalam konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990. Pada pasal 3 disebutkan bahwa Negara harus berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang lain secara sah atas dia.

Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, dipenuhi segala hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Hakekat pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, yang terdiri dari laki-laki, maupun perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan. Pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, baik sebagai pelaku ataupun penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri, yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dan daerah.

Untuk itu dipandang perlu menyusun profil Gender dan Anak sebagai bahan perencanaan untuk pembangunan yang perspektif gender dan anak.

B. Tujuan

Penerbitan buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran peran dan fungsi perempuan dan laki-laki serta kondisi anak di Provinsi Bengkulu secara menyeluruh di setiap tingkat administrasi dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender, terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

C. Sumber Data

Dalam penyusunan buku ini, tim penulis menggunakan berbagai data terpilih yang bersumber dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas P3A&PPKB

Kabupaten/Kota, data Sensus dan Survey BPS, serta Instansi Terkait yang ada di Provinsi Bengkulu.

D. Sistematika Penyajian

Buku ini disajikan dalam tujuh bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan buku, tujuan, sumber data dan sistematika penyajian. Bab kedua yaitu Gambaran Umum yang berisi Letak Geografis Provinsi Bengkulu dan Pemerintahan. Bab ke-tiga Profil Gender yang berisi Data Kependudukan, Politik dan Pengambilan Keputusan, serta Data Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Bab ke-empat Profil Anak yang berisi Perlindungan Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Bab ke-lima Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berisi data kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bab ke-enam Perangkat Hukum dan Kelembagaan. Terakhir Bab ke-tujuh Penutup. Grafik yang disajikan dalam buku profil gender dan anak ini berasal dari tabel data buku data terpilah gender dan anak tahun 2018.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI BENGKULU

A. Sejarah Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu awalnya merupakan sebuah keresidenan yang sudah ada sejak zaman penjajahan belanda dengan status Daerah Administrasi di bawah kordinasi Gubernur Sumatera Selatan. Pada tanggal 18 November 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Jo Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Karesidenan Bengkulu diresmikan menjadi salah satu Provinsi di Republik Indonesia yang ke-26.

Perkembangan administrasi di Bengkulu secara ringkas adalah sebagai berikut,

1. Tahun 1878-1945, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi Keresidenan.
2. Tahun 1945-1947, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu terdapat pula sistem K.N.I. Keresidenan.
3. Tahun 1947-1950, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu K.N.I. Keresidenan menjadi DPR Keresidenan.
4. Tahun 1950-1968, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi lagi, sedangkan DPR Keresidenan dibubarkan.
5. Tahun 1968- ... , daerah Bengkulu menjadi provinsi otonom yang berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Gubernur
6. Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968.
7. Perjalanan sejarah Bengkulu menjadi sebuah provinsi yang otonom dapat dibagi menjadi tujuh periode. Periode I, sebelum tahun 1685, di bawah pengaruh atau mengadakan kontak dagang dengan Kesultanan Banten. Periode II, tahun 1685-1824, di bawah kekuasaan pemerintahan Inggris sebagai daerah jajahan. Periode III, tahun 1824-1942, di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan. Periode IV, tahun 1942-1945, di bawah kekuasaan Jepang. Periode V, tahun 1945-1946, menjadi bagian dari Provinsi Sumatera. Periode VI, tahun 1946-1968, menjadi

bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Periode VII, melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi Provinsi Bengkulu.

8. Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km², terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk.
9. Bengkulu juga menjadi salah satu mata rantai yang selalu dicatat oleh sejarah. Salah satu alasannya karena di bumi Rafflesia ini pula, Soekarno presiden pertama Republik Indonesia pernah menjalani pengasingan oleh pemerintah kolonial, selama empat tahun, 1938-1942.
10. Pada tanggal 18 November 1968, atas dasar UU No. 9/1967 Junkto Peraturan Pemerintah No. 20/1968, Keresidenan Bengkulu diresmikan menjadi salah satu Provinsi di Republik Indonesia yang ke-26 dengan Ali Amin sebagai Gubernur Bengkulu.
11. Bengkulu yang ditetapkan sebagai provinsi pada 18 November 1968 itu, kini memiliki sepuluh kabupaten/kota, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.

B. Letak Geografis

Provinsi Bengkulu secara geografis terletak disepanjang pantai Barat Sumatera lebih kurang 525 Km dari gugusan pulau Enggano yang berada lebih kurang 90 mill laut dilautan Hindia sebelah Selatan Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu mempunyai luas wilayah 34.724,69 km² (laut : 14.929,54 km² dan luas daratan 19.788,70 km² (Sumber : Bakorsutanal) dan secara geografis terletak diantara 2°16' - 3°31' lintang selatan dan 101°01' - 103°41' Bujur Timur dengan suhu udara relatif sama dengan daerah daerah kota

pinggiran pantai lainnya di Indonesia, suhu udara Maksimum 32,9 – 34° C sedangkan suhu udara Minimum berkisar antara 22 – 23,3°C.

Letak Provinsi Bengkulu secara geografis berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia berada di sepanjang pantai barat Sumatera sekitar 525 Km dari Kepulauan Enggano dimana sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan Provinsi Lampung, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Bengkulu terletak di sepanjang kaki Bukit Barisan dan di atas tiga lempengan dan satu patahan sehingga kerap kali mengalami gempa bumi. Selain gempa vulkanik juga gempa tektonik yang dapat dirasakan di seluruh wilayah Bengkulu.

Provinsi Bengkulu ada yang terletak pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut yang diklasifikasikan sebagai low land yang mencapai luas 35,80 % dari luas Provinsi Bengkulu. Ada pula wilayah yang terletak pada ketinggian 100 – 1000 meter di atas permukaan laut yang diklasifikasikan sebagai daerah Bukit Range seluas 20,50 % dari luas Provinsi Bengkulu dan ada juga wilayah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut yang merupakan daerah vulkanis dan tektonis dengan luas 12,10 % dari luas Provinsi Bengkulu. Letak geografis Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada peta berikut:

Grafik 2.B.1 Peta Provinsi Bengkulu



Sumber : Bappeda Prov. Bkl

Semenjak otonomi daerah di Provinsi Bengkulu pada tahun 2008, maka sampai dengan tahun 2012 Provinsi Bengkulu telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah kabupaten. Sehingga sampai saat ini menjadi 9 kabupaten dan 1 kota yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan kabupaten pemekaran terakhir. Begitu juga telah terjadi pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan dengan penyebaran kecamatan, desa dan kelurahan sebagai berikut :

Tabel 2.B.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah	
			Desa	Kecamatan
1	Bengkulu Selatan	1 186,10	158	11
2	Rejang Lebong	1 639,98	156	15
3	Bengkulu Utara	4 324,60	220	19
4	Kaur	2 369,05	195	15
5	Seluma	2 400,44	202	14
6	Muko-Muko	4 036,70	152	15
7	Lebong	1 921,82	104	12
8	Kepahiang	665,00	117	8
9	Bengkulu Tengah	1 223,94	143	10
10	Kota Bengkulu	151,70	67	9
Jumlah Provinsi		19 919,33	1514	128

Sumber Data : BPS Provinsi Provinsi Bengkulu

Jika dilihat pada tabel di atas, dari 9 kabupaten 1 kota dengan 128 kecamatan, 1.514 desa. Ternyata Kabupaten Bengkulu Utara merupakan wilayah kabupaten yang terluas dan terbanyak mempunyai desa dan Kota Bengkulu merupakan wilayah terkecil dengan jumlah kelurahan paling sedikit.

C. Pemerintahan

Nama Resmi : Provinsi Bengkulu
Ibu Kota : Bengkulu
Luas Wilayah : 19.919,33 Km²

LOGO



1. Lambang Daerah Provinsi Bengkulu berbentuk tameng.
2. Ditengah-tengah terdapat tameng kecil yang di dalamnya berisikan setangkai padi dan setangkai kopi bersama daunnya.
3. Sedangkan ditengah-tengahnya terdapat bunga Rafflesia, rudus, cerana dan bintang besar.
4. Sebuah pita dengan bertuliskan : "BENGKULU".

Makna Warna di dalam Lambang sebagai berikut:

Hijau : Kesuburan,
Biru : Kemakmuran,
Merah : Dinamika Kegembiraan,
Ungu : Ketenangan kedamaian,
Kuning : Kejayaan.

Warna hijau di atas tameng mencerminkan daerah pegunungan Bukit Barisan dengan tanahnya yang subur sebagai batas tanah daerah Provinsi Bengkulu sebelah Timur, warna biru berombak dengan 18 (delapan belas) gelombang berarti Laut dengan sumber kekayaan sebagai batas daerah Propinsi Bengkulu sebelah Barat.

Dalam tameng kecil di sebelah kiri terdapat setangkai padi yang berwarna kuning. Buah padi bercelah 17 (tujuh belas) butir melambangkan tanggal 17. Disebelah kanan terdapat setangkai bunga kopi berwarna putih dan buah kopi berwarna hijau, bunga kopi berwarna putih dan buah kopi berjumlah 8 (delapan) melambangkan bulan Agustus. Tulang daun kopi bagian atas berjumlah 4 (empat) garis. bagian bawah berjumlah 5 (lima) garis melambangkan tahun 1945, arti keseluruhannya Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17-8-1945)

Garis gelombang 18 (delapan batas) melambangkan tanggal 18, Daun kopi berjumlah 11 (sebelas) helai melambangkan bulan November, Bunga kopi setiap tangkai berjumlah 6 (enam) dan buah kopi setiap tangkai berjumlah 8 (delapan). Arti keseluruhannya adalah hari kelahiran Provinsi Bengkulu (18 November 1968)

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistis menjadi desentralistis melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah daerah diberi peluang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota.

I. DAFTAR NAMA GUBERNUR DARI TERBENTUKNYA PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	MULAI JABATAN	AKHIR JABATAN	PERIODE	JENIS KELAMIN
1	Ali Amin	1968	1974	1	L
2	Abdul Chalik	1974	1979	2	L
3	Suprpto	1979	1984	3	L
4	Suprpto	1984	1989	4	L
5	Razie yahya	1989	1994	5	L
6	Adjis Ahmad	1994	1999	6	L
7	Hasan Zen	1999	2004	7	L
8	Agusrin Maryono Najamuddin	2005	2010	8	L
9	Agusrin Maryono Najamuddin	2010	2012	9	L

10	Junaidi Hamsyah	2012	2015	10	L
11	Ridwan Mukti	2016	2017	11	L
12	Rohidin Mersyah	2017	Sekarang	12	L

Sumber: Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Prov.Bengkulu

II. DAFTAR NAMA WAKIL GUBERNUR DARI TERBENTUKNYA PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	MULAI JABATAN	AKHIR JABATAN	PERIODE	JENIS KELAMIN
1	M. Sofyan Yusuf	1979	1984	3	L
2	M. Sofyan Yusuf	1984	1986	4	L
3	Razie Yahya	1986	1989	5	L
4	R. Usup Supriyadi	1990	1995	6	L
5	Iskandar Ramis	1996	2001	7	L
6	Iskandar Ramis	1999	2004	8	L
7	Muhammad Syamlan	2005	2010	9	L
8	Junaidi Hamsyah	2010	2012	10	L
9	Sultan Bachtiar Najamudin	2012	2015	11	L
10	Rohidin Mersyah	2016	2017	12	L

Sumber: Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Prov.Bengkulu

Pada Pemilu tahun 2019, anggota legislatif yang terpilih sebanyak 328 orang dengan komposisi 46 orang perempuan dan laki-laki 282 orang.

Adapun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Sekretariat Pemda Provinsi Bengkulu dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas dan Badan/Inspektorat/Kantor/Unit Organisasi. Pada akhir tahun 2018, jumlah PNS di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu sebanyak 10.635 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 5104 orang (47,99 %) dan perempuan sebanyak 5531 orang (52,01 %). Sebagian besar PNS adalah golongan III sebesar 73,15 %.

Di pihak lain, anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa dan terlindungi, maka pembangunan nasional menetapkan bahwa Pembangunan Anak sebagai prioritas. Pembangunan Anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan menghargai partisipasi anak. Semua itu diwujudkan dalam bentuk pemenuhan Hak Anak.

Upaya untuk membangun anak menjadi SDM yang berkualitas sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Right of the Child* (CRC) sebagai salah satu instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pada rancangan RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diharapkan pembangunan anak yang disebut perlindungan anak sudah dicakup di dalamnya, pelaksanaannya masih mencari bentuk yang efektif. Uji coba yang dilakukan dengan berbagai keterbatasan, menyebabkan pelaksanaan perlindungan anak yang terpecah-pecah (*segmented*), tidak berkelanjutan dan tidak terintegrasi. Anak masih belum terlihat sosoknya, karena belum ada instrumen yang bisa menggrafikkannya. Selain itu, pemenuhan Hak Anak, baru dilakukan di beberapa bidang pembangunan dan belum menjadi perhatian dalam pembangunan daerah.

Sesuai Undang undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi mempunyai 6 sub urusan yaitu :

A. Kualitas Hidup Perempuan

1. Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi.
2. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi.

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi.

B. Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan stake holder di daerah Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Provinsi.

C. Kualitas Keluarga

1. Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.
3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak.

D. Sistem Data Gender dan Anak

Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Provinsi.

E. Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Provinsi.
2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.

F. Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan semua pihak daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota

2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah kabupaten/ kota.

Dan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, mempunyai 3 sub urusan:

A. Pengendalian Penduduk

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi.

B. Keluarga Berencana

1. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

C. Keluarga Sejahtera

1. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 mencatumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan, mengintegrasikan perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender pada level pemerintah daerah.

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Bengkulu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :Perumusan program di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/ RPJMD;

- a. Perumusan kebijakan teknis di pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan teknis pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Agar dapat terukur keberhasilannya maka dapat diukur melalui pencapaian indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Adapun indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
2. Nilai Indeks Pembangunan Gender (GDI) ;
3. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) ;
4. Laju pertumbuhan penduduk
5. Persentase Rasio aseptor KB
6. Persentase remaja perempuan usia 15-19 tahun yang melahirkan
7. Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan
8. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

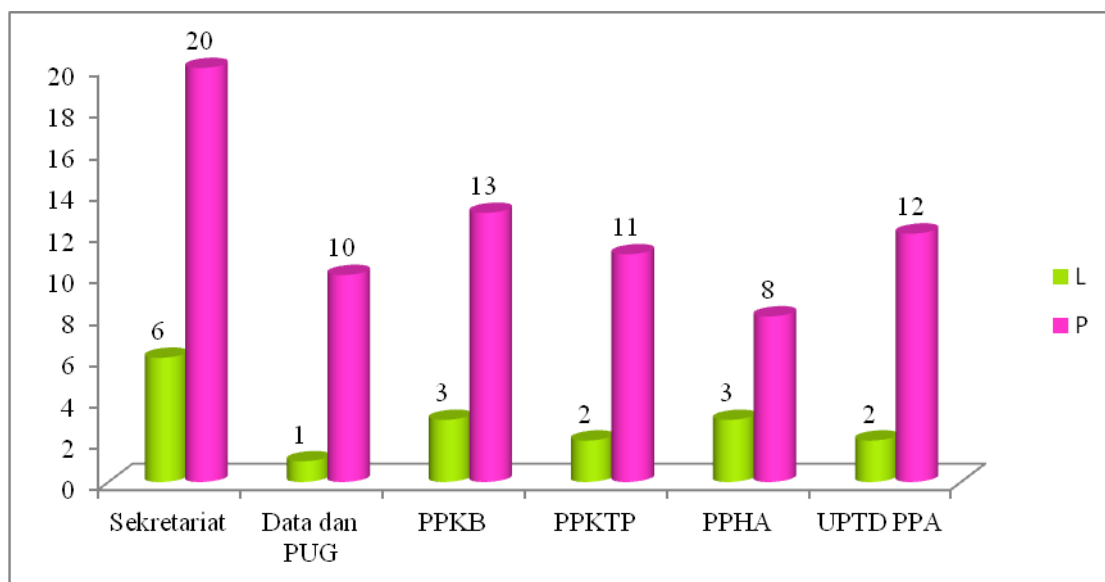
Indikator kinerja dapat dicapai melalui pelaksanaan Program-Program pembangunan yang dilaksanakan dalam tahun 2018, meliputi :

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan informasi dan konseling KRR
3. Program Pelayanan Kontrasepsi

4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
5. Program Keserasian, kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
6. Program Pengutan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
7. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
8. Program Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan

Agar dapat melaksanakan kedelapan program di atas diperlukan dukungan sumber daya tenaga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Jika dilihat dari personal tenaga maka masih kekurangan tenaga, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.C.1 Jumlah tenaga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2018



Sumber data : DP3A&PPKB, 2018

Jika dilihat grafik di atas ternyata sebagian besar (81,32 %) pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah perempuan, yaitu sebanyak 74 orang dari total 91 orang.

BAB III

PROFIL GENDER DAN ANAK

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Untuk mengetahui hasil pembangunan yang perspektif gender digunakan beberapa indikator, salah satu diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender. Angka IPG menggrafikkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Table.3.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	IPM
1	Kota Bengkulu	79.67
2	Bengkulu Selatan	69.85
3	Rejang Lebong	69,40
4	Bengkulu Utara	68.36
5	Muko-muko	67.47
6	Kepahiang	67.14
7	Lebong	66.28
8	Bengkulu Tengah	66.65
9	Kaur	66,20
10	Seluma	65.99
Provinsi Bengkulu		70.64

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi 4 kategori atau golongan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah jika <60 , sedang $60 \leq \text{IPM} < 70$, tinggi $70 \leq \text{IPM} < 80$, dan ≥ 80 sangat tinggi (BPS:2014). Karena pembangunan di Indonesia tidak merata maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah-wilayah terutama kabupaten/kota sangatlah beragam.

Dari table di atas, IPM tertinggi ada di Kota Bengkulu, yaitu sebesar 79,64%, sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Seluma, yaitu sebesar 65, 95%. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2018 mencapai 71,39, IPM Provinsi Bengkulu tahun 2018 dibawah IPM Nasional, yaitu sebesar 70,64.

Table.3.2 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup		Angka Harapan Lama Sekolah		Rata-Rata Lama Sekolah		Pengeluaran Perkapita		IPG
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kota Bengkulu	67.69	71.63	15.58	16.41	11.81	11.49	16,758	12,863	96.55
2	Bengkulu Selatan	65.51	69.36	13.59	14.14	9.45	8.55	12,930	9,313	94.08
3	Rejang Lebong	65.89	69.88	12.95	14.23	8.38	7.74	13,800	9,207	94.59
4	Bengkulu Utara	65.71	69.58	12.46	13.15	8.34	7.45	14,715	8,374	91.19
5	Muko-muko	64.17	68.04	12.73	12.65	8.23	7.54	15,707	5,794	84.18
6	Kepahiang	65.37	69.3	12.67	13.37	8.54	7.71	11,330	8,769	95.2
7	Lebong	60.94	64.55	11.95	12.54	8.31	7.49	17,024	9,465	90.99
8	Bengkulu Tengah	65.88	69.74	13.04	12.97	7.63	6.54	13,536	6,262	86.36
9	Kaur	64.14	68.04	13.16	12.82	8.84	8.02	11,923	5,958	87.20
10	Seluma	65.13	69.04	12.95	13.30	8.39	7.39	12,168	5,203	85.28
	Provinsi Bengkulu	66.89	70.76	13.30	13.98	8.93	8.28	14,197	8,014	91.37

Sumber data : BPS Provinsi Bengkulu

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

IPG tertinggi berada di Kota Bengkulu, yaitu sebesar 96,55. IPG terendah berada di Kabupaten Seluma, yaitu 85,28. Dan IPG provinsi Bengkulu tahun 2018, yaitu 91,37 melebihi IPG Nasional, yaitu 90,00.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Table.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bengkulu
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	Bengkulu	15.56	49.02	35.24	69.60
1	Bengkulu Selatan		47.98	42.57	54.89
2	Rejang Lebong	16.67	50.91	24.65	61.99
3	Bengkulu Utara	10	50.39	38.75	65.92
4	Kaur	12	45.65	37.90	66.25
5	Seluma	10	50.61	34.79	61.95
6	Muko-muko	8	52.33	33.51	61.40
7	Lebong	28	48.16	37.96	79.68
8	Kepahiang	20	51.82	36.05	73.63
9	Bengkulu Tengah	20	48.50	42.14	73.80
10	Kota Bengkulu	25.71	47.41	32.98	76.61

Sumber data : BPS Provinsi Bengkulu

IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.

- IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.
- Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.

Dimensi	Indikator
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian; Laki-2 & Perempuan

IDG di Provinsi Bengkulu tertinggi berada di Kota Bengkulu, yaitu sebesar 76,61, yang terendah berada di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu, 54,89. Sementara itu IDG Provinsi Bengkulu sebesar 69,60 dan masih di bawah IDG nasional yang sebesar 72,10

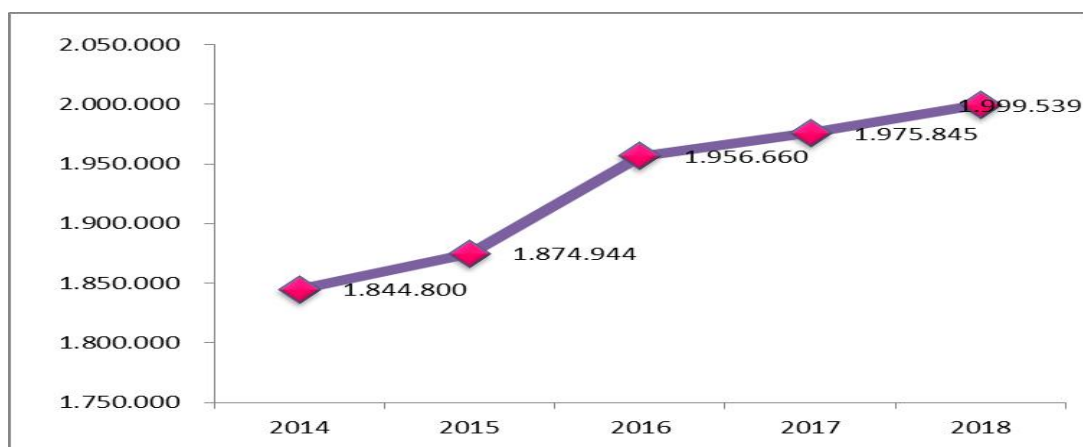
A. Kependudukan

Jumlah penduduk dengan berbagai karakteristik, seperti golongan umur ataupun jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai berbagai permasalahan penduduk yang mungkin ada. Pengelolaan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menunjang pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

1. Karakteristik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 adalah 1.999.539 jiwa, terdiri dari 1.025.729 (51 %) laki-laki dan 973.810 (49 %) perempuan. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan jumlah penduduk 1.975.845. maka terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 23.694 jiwa (1,18%), dengan rincian penduduk laki-laki naik sebesar 11.373 jiwa (1,11%) dan perempuan naik sebesar 11.321 jiwa (1,16%). Berdasarkan data ini, kenaikan jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak daripada penduduk berjenis kelamin laki-laki.

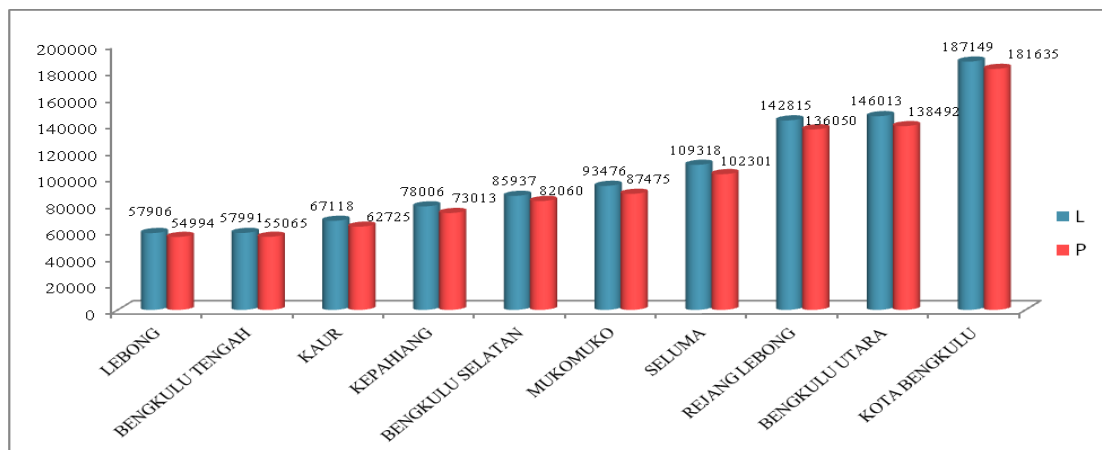
Grafik 3.A.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2014 s.d 2018



Sumber data : BPS dan Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Penyebaran penduduk diprovinsi Bengkulu ditinjau dari kabupaten/kota relatif tidak merata. Penduduk Provinsi Bengkulu lebih banyak terdapat di Kota Bengkulu, Bengkulu Utara dan Rejang Lebong, proporsi penduduk Provinsi Bengkulu yang berdiam diketiga daerah ini pada tahun 2018 mencapai 46,62% dengan rincian 18,44% terdapat dikota Bengkulu, 14,23% terdapat dikabupaten Bengkulu Utara dan 13,95% dikabupaten Rejang lebong.

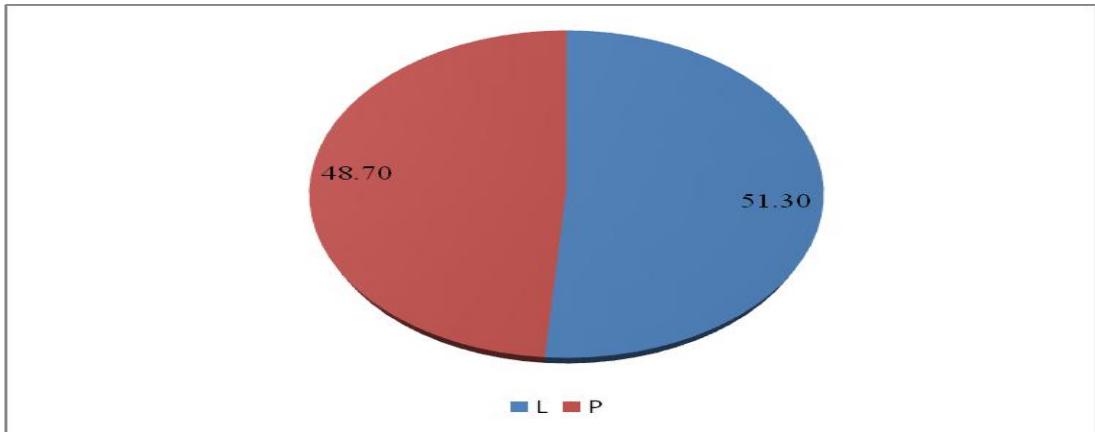
Grafik 3.A.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Jumlah Penduduk terbanyak berada di Kota Bengkulu yang mencapai 368.784 Jiwa (18,44%) yang terdiri dari 187.149 jiwa penduduk laki-laki dan 181.635 jiwa penduduk perempuan, hal ini disebabkan karena Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Provinsi dan pusat pemerintahan serta pusat pendidikan. Sementara jumlah penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Lebong, dengan jumlah penduduk 112.900 (5,65%) yang terdiri dari 57.906 jiwa penduduk laki-laki dan 54.994 jiwa penduduk perempuan, hal ini disebabkan karena letak kabupaten Lebong yang relatif jauh dari pusat ibukota provinsi dan kabupaten lainnya.

Grafik 3.A.3 Persentase Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2018

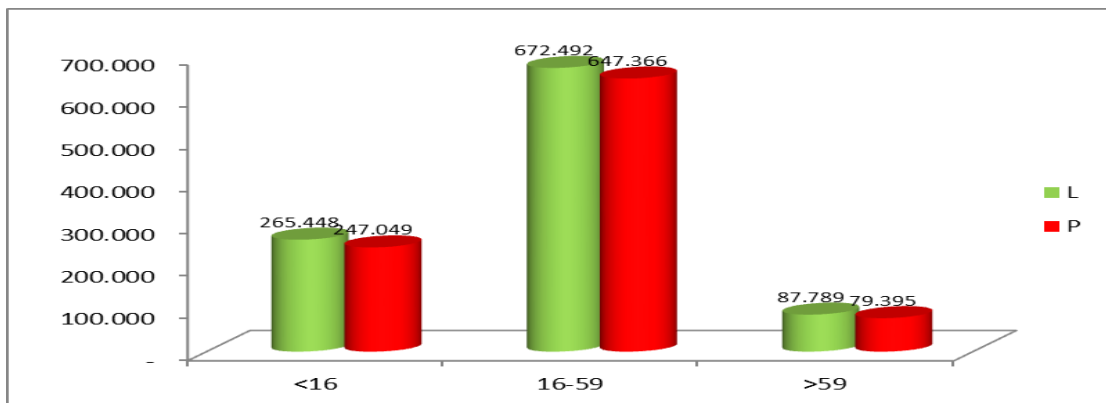


Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Secara umum, potensi sumberdaya manusia di Provinsi Bengkulu cukup besar, dengan jumlah penduduk 1.999.539 jiwa. Dimana angka rasio jenis kelamin (sex ratio) antara penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Bengkulu sebesar 105,33. Sex ratio adalah perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Dinyatakan dalam banyak penduduk laki-laki per 100 orang perempuan.

Berdasarkan grafik diatas Dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 persentase penduduk Provinsi Bengkulu yang berjenis kelamin Perempuan relatif lebih kecil (48,70%) dibandingkan dengan persentase Laki-laki (51,30%) walaupun tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu besar.

Grafik 3.A.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota Tahun 2018

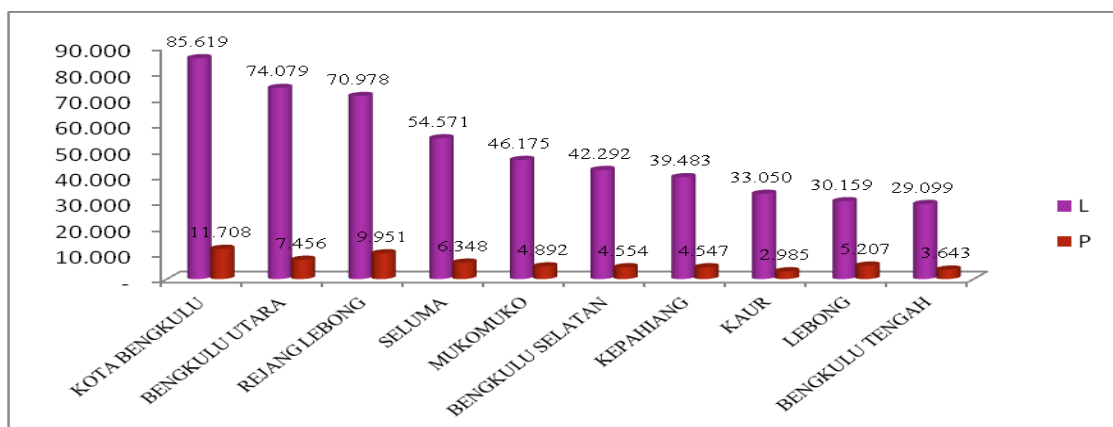


Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data di atas jumlah kelompok umur yang paling tinggi terdapat pada usia 16-59 tahun, yaitu berjumlah 1.319.585 (66,01%), melampaui kelompok umur lainnya. Kelompok usia 16 – 59 tahun merupakan usia produktif. Dimana pada kelompok usia tersebut umumnya merupakan usia kerja. Sehingga bertambahnya jumlah usia produktif turut menambah jumlah tenaga kerja. Bila kelompok penduduk usia produktif ini berkualitas tinggi dan produktif, maka dapat menguntungkan karena produktivitas tinggi. Namun bila kelompok ini tidak berkualitas dan tidak produktif, maka dapat merugikan karena harus menanggung kelompok ini. Usia produktif merupakan potensi sumberdaya manusia yang bisa dikembangkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sedangkan komposisi umur penduduk Provinsi Bengkulu yang paling sedikit berada pada kelompok umur >59 tahun, yaitu berjumlah 167.184 (8,36%) baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan yang merupakan kelompok usia non produktif karena termasuk golongan manula.

Grafik 3.A.5 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah Kepala Keluarga Terbanyak ada di Kota Bengkulu, yaitu berjumlah 97.327 orang (17,17%) dengan Kepala Keluarga Laki-Laki sebanyak 85.619 orang dan Kepala Keluarga Perempuan sebanyak 11.708 orang. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga yang paling sedikit berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu berjumlah 32.742 orang (5,78%) dengan Kepala keluarga Laki-laki sebanyak 29.099 orang dan Kepala Keluarga Perempuan sebanyak 3.643

orang. Secara umum jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 89,19 % sedangkan kepala keluarga perempuan sebanyak 10,81 %.

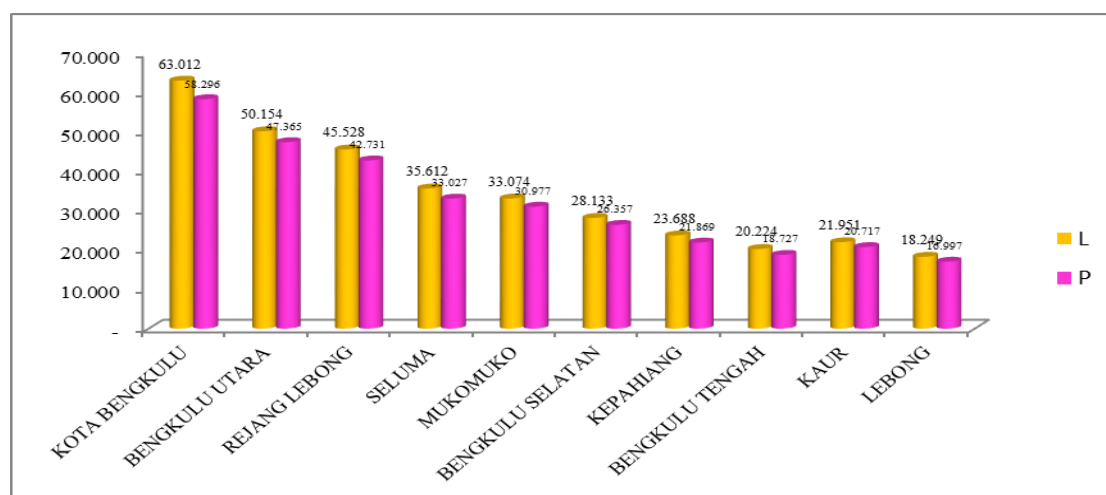
Tabel 3.A.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Tahun 2018

PENDIDIKAN AKHIR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Strata III	264	116	380
Strata II	3.766	2.450	6.216
Diploma I/II	4.219	6.294	10.513
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	7.866	13.790	21.656
Diploma IV/Strata I	44.271	46.581	90.852
Belum Tamat SD/Sederajat	122.057	115.169	237.226
SLTP/Sederajat	154.298	142.274	296.572
SLTA/Sederajat	210.286	174.127	384.413
Tidak/Belum Sekolah	240.321	231.104	471.425
Tamat SD/Sederajat	238.381	241.905	480.286
Grand Total	1.025.729	973.810	1.999.539

Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Bila dilihat dari tabel di atas penduduk dengan pendidikan akhir Tamat SD/Sederajat menduduki angka tertinggi yaitu sebanyak 480.286 orang (24,02%) sedangkan penduduk dengan pendidikan akhir Strata III jumlahnya paling sedikit, yaitu sebanyak 380 orang (0,02%).

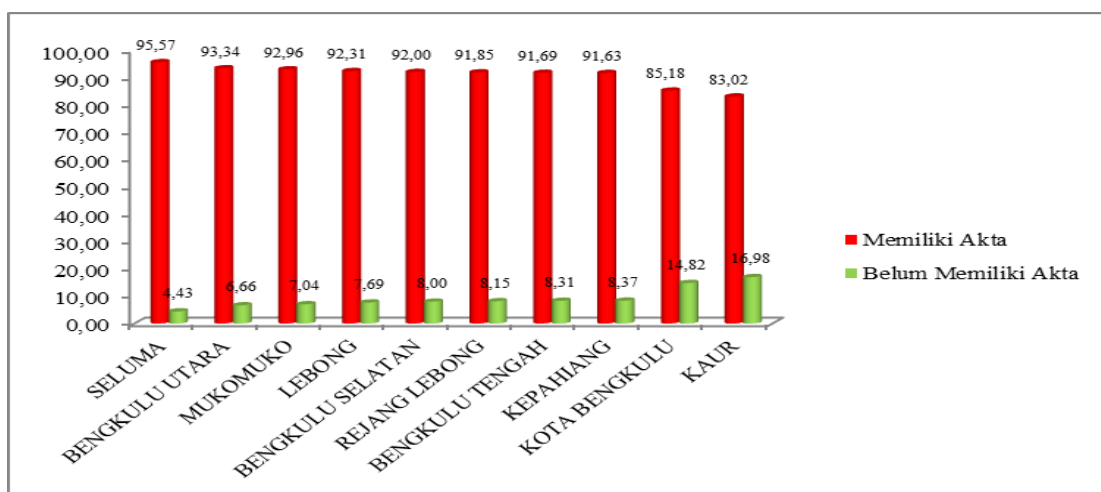
Grafik 3.A.6 Jumlah Anak Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Dari grafik di atas jumlah anak terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 121.308 orang (18,47 %) dengan rincian Anak laki-laki sebanyak 63.012 orang dan anak perempuan 58.296 orang. Sedangkan jumlah anak paling sedikit ada di Kabupaten Lebong, yaitu berjumlah 35.246 orang (5,37 %) dengan rincian anak laki-laki sebanyak 18.249 dan anak perempuan sebanyak 16.997 orang. Dari total jumlah anak 656.688 orang.

Grafik 3.A.7 Persentase Anak yang Memiliki Akta dan Belum Memiliki Akta Tahun 2018



Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Dari data di atas jumlah anak yang paling banyak memiliki akta kelahiran yaitu Kabupaten Seluma, yaitu sebanyak 65.598 orang (95,57%) dari jumlah anak 68.639 orang, dimana yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 3.041 orang (4,43%). Sedangkan yang paling banyak belum memiliki akta kelahiran adalah Kabupaten Kaur yaitu sebanyak 7.245 orang (16,98%) dari jumlah anak 42.668 orang, yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 35.42 orang (83,02%). Secara umum persentase anak yang memiliki akta kelahiran sebanyak 596.105 orang (90,77 %) dan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 60.583 orang (9,23 %).

Identitas awal ketika seseorang dilahirkan adalah akta kelahiran, yaitu suatu pernyataan negara bahwa nama yang disebut dalam dokumen diakui oleh negara sebagai penduduk/warga. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk

kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.

Masih banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran terkendala banyak hal seperti jarak yang jauh, pengurusan yang berbelit, hingga denda yang tidak mampu dibayar warga negara.

B. Pendidikan

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang menyatakan bahwa : Tiap tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

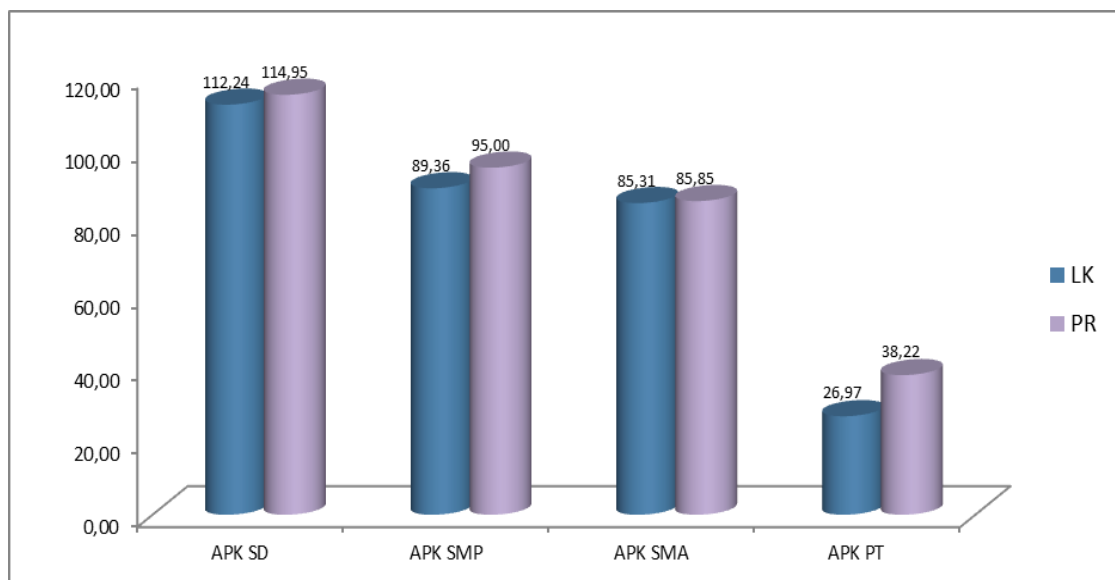
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesai sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III pasal 4 yang menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Mutu pendidikan sangat tergantung dari program pendidikan yang dilaksanakan. Bukan hanya itu pendidikan bermutu bisa didapatkan bila tenaga pengajar benar-benar bisa melaksanakan program pendidikan dengan baik, dan ditunjang dengan sarana pendidikan yang bermutu.

Dalam Misi Kedua Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam RPJMD, yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang sejahtera melalui peningkatan kuantitas dan kualitas di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan bidang pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis, keunggulan lokal. Dimana dalam peningkatan kuantitas dan kualitas bidang pendidikan dilaksanakan melalui Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan kesejahteraan guru.

Grafik 3.B.1 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018



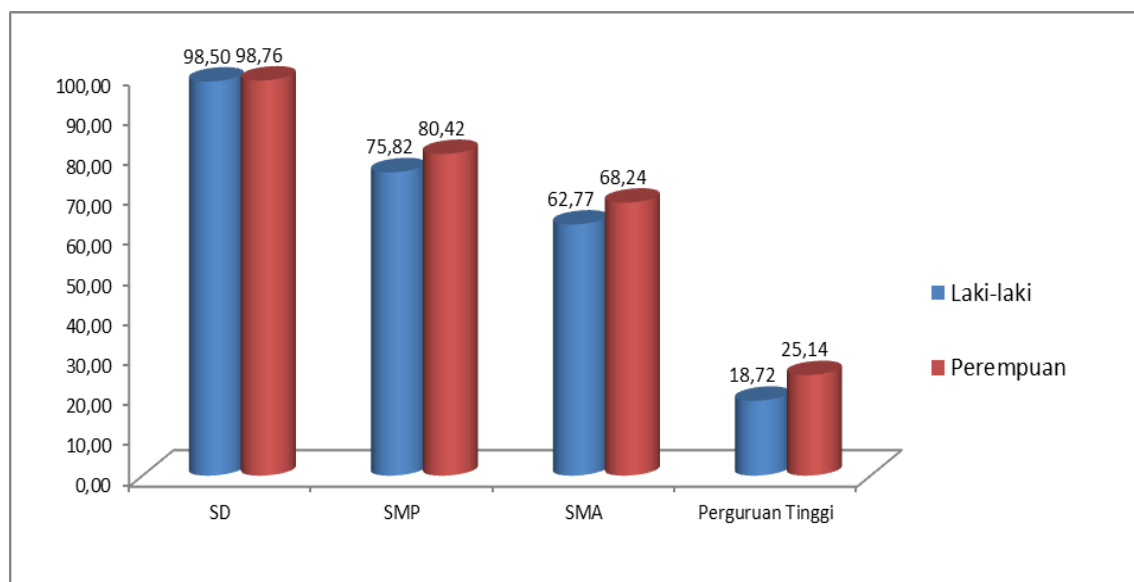
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Dari data di atas angka partisipasi kasar SD yang sangat tinggi lebih dari 100 % baik laki-laki maupun perempuan. APK SMP dan SMA mendekati 100 %, sedangkan APK Perguruan Tinggi hanya 26,97 % untuk laki-laki dan 38,22 % untuk perempuan.

Angka Partisipasi Kasar Adalah: Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Grafik 3.B.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

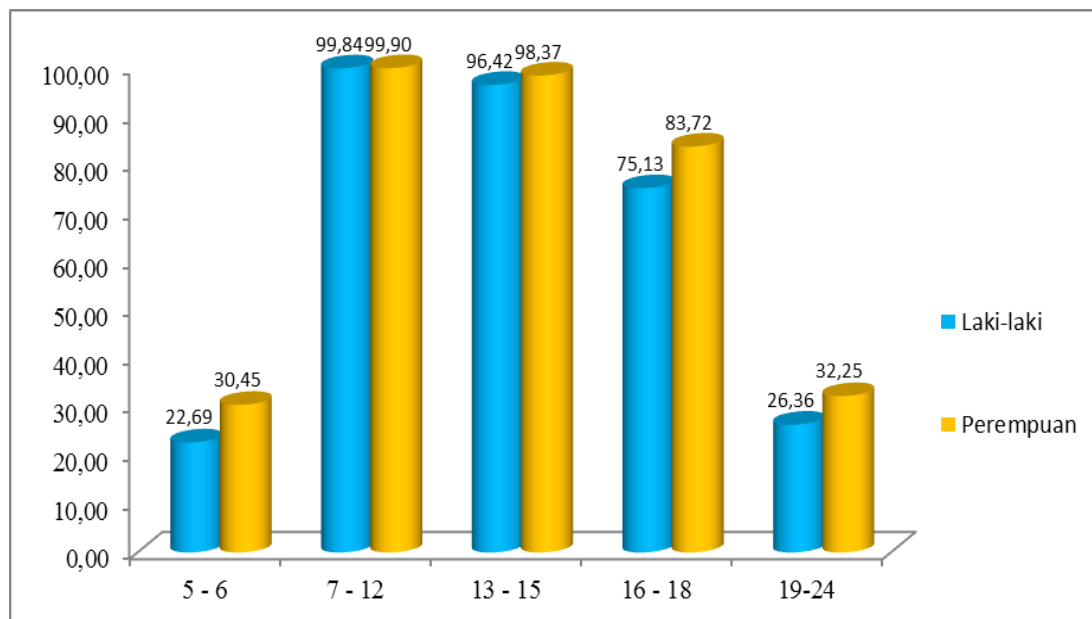
Dari grafik di atas APM SD yang paling tinggi mendekati 100, yaitu 98,50% untuk laki-laki dan 98,76% untuk perempuan. Sedang APM yang paling rendah adalah APM Perguruan Tinggi dimana 18,72% untuk laki-laki dan 25,14% untuk perempuan.

Angka Partisipasi Murni adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur

tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

Grafik 3.B.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 5 s.d 24 Tahun Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018



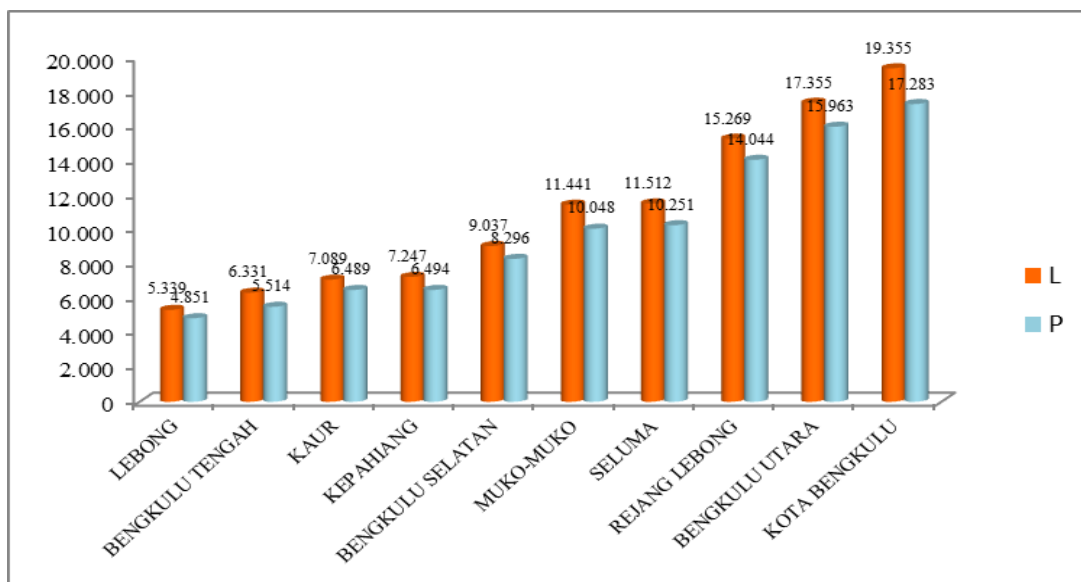
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Dari grafik di atas angka partisipasi sekolah tertinggi berada di umur 7-12, dimana APS laki-laki 99,84% dan Perempuan 99,90%. Dan umur 13-15, yaitu untuk laki-laki 96,42% dan perempuan 98,37%. APS terendah ada di umur 5-6, yaitu 22,69 % untuk laki-laki dan 30,45 untuk perempuan.

Angka Partisipasi Sekolah adalah: Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

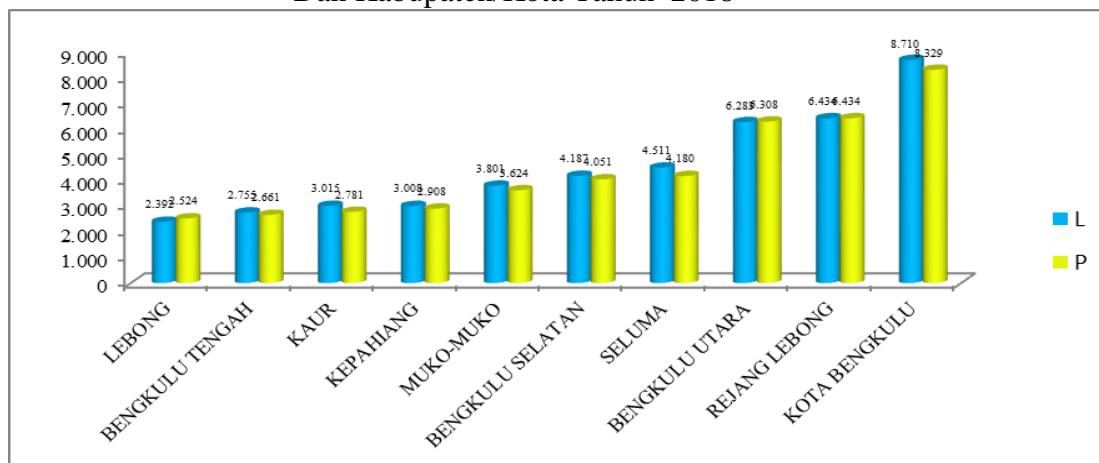
Grafik 3.B.4 Jumlah Anak Sekolah Dasar (SD) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah anak sekolah dasar terbanyak ada di kota Bengkulu yaitu 36.638 orang (17,51%), dengan rincian laki-laki 19.355 orang dan perempuan 17.283 orang. Sedang jumlah anak sekolah paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu 10.190 orang (4,87%) dengan rincian laki-laki 5339 orang dan perempuan 4.851 orang. Dari total jumlah anak sekolah dasar 209.208 orang.

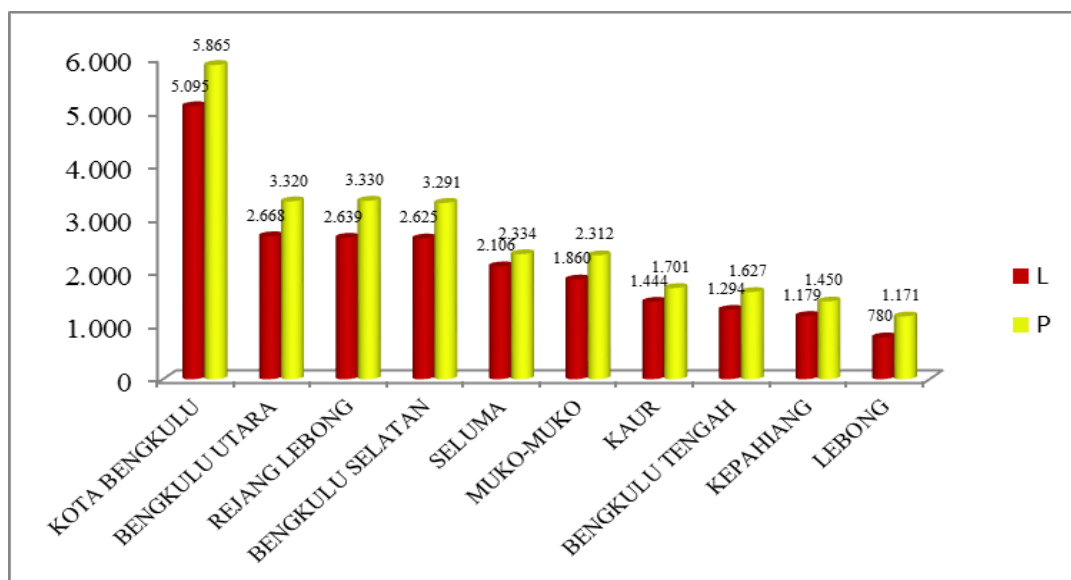
Grafik 3.B.5 Jumlah Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah anak sekolah menengah pertama terbanyak ada di kota Bengkulu yaitu 17.039 orang (19,17%), dengan rincian laki-laki 8.710 orang dan perempuan 8.329 orang. Sedang jumlah anak sekolah menengah pertama paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu 4.916 orang (5,53 %) dengan rincian laki-laki 2.392 orang dan perempuan 2.524 orang. Dari total jumlah anak sekolah menengah pertama 88.896 orang.

Grafik 3.B.6 Jumlah Anak Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018

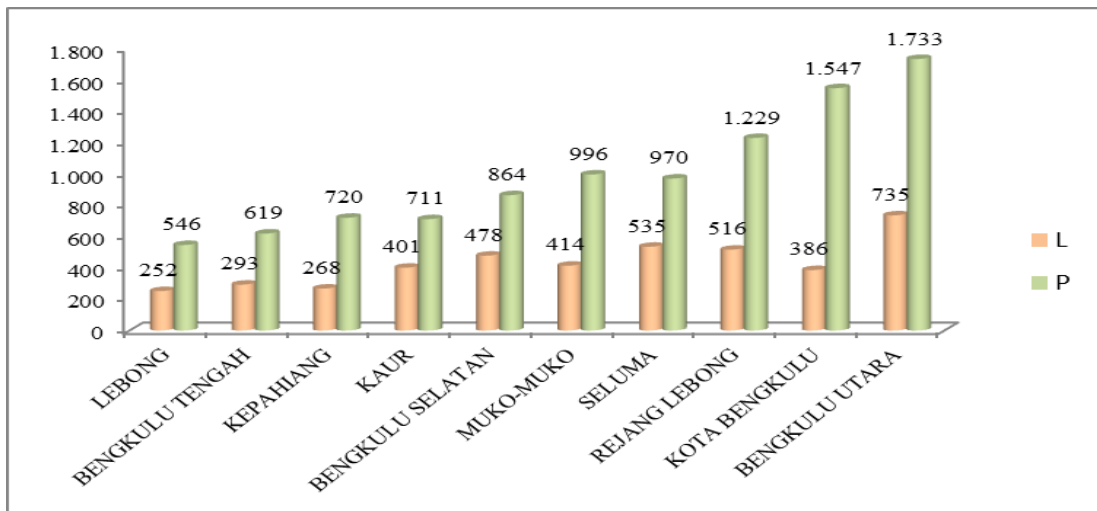


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah anak sekolah menengah atas terbanyak ada di kota Bengkulu yaitu 10.960 orang (22,79%), dengan rincian laki-laki 5.095 orang dan perempuan 5.865 orang. Sedang jumlah anak sekolah menengah atas paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu 1.951 orang (4,06 %) dengan rincian laki-laki 780 orang dan perempuan 1.171 orang. Dari total jumlah anak sekolah menengah atas 48.091 orang.

Secara keseluruhan jumlah anak usia sekolah (SD s.d SMA/Kejuruan) terbanyak berada di Bengkulu Utara, yaitu berjumlah 56.063 orang (16,48%) dengan rincian jumlah anak usia sekolah laki-laki sebanyak 28.848 orang dan anak perempuan sebanyak 27.215 orang. Sedangkan jumlah anak usia sekolah (SD s.d SMA/Kejuruan) paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu berjumlah 18.939 orang (5,57%) dengan rincian jumlah anak usia sekolah laki-laki sebanyak 9.548 orang dan anak perempuan sebanyak 9.391 orang.

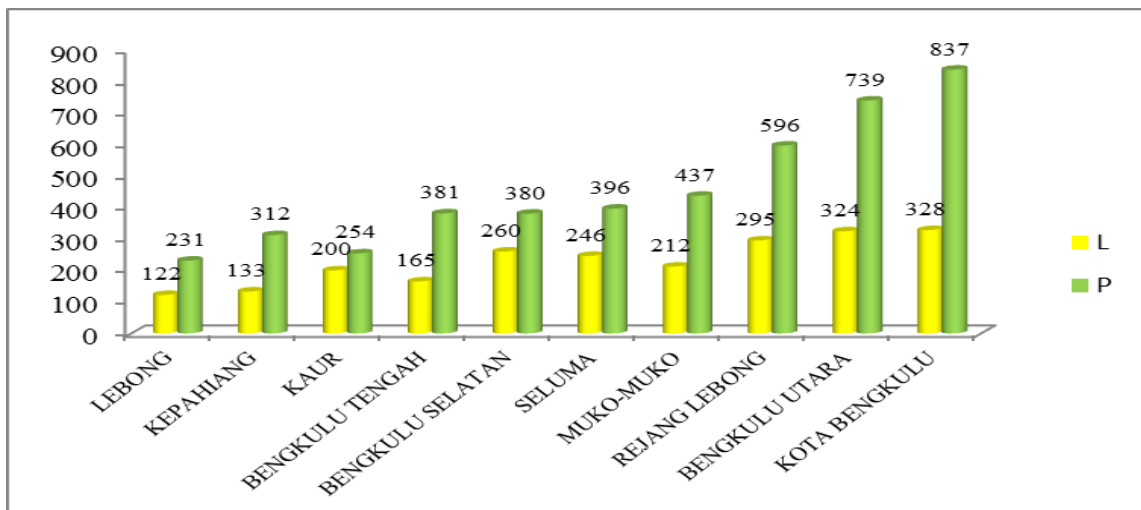
Grafik 3.B.7 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Dari grafik di atas jumlah tenaga pendidik tingkat Sekolah Dasar terbanyak berada di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu sebanyak 2.468 orang (17,36%) dengan rincian tenaga pendidik laki-laki sebanyak 735 orang dan tenaga pendidikan perempuan sebanyak 1.733 orang. Sedangkan jumlah tenaga pendidik paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu berjumlah 798 orang (5,61%) dengan rincian tenaga pendidik laki-laki sebanyak 252 orang dan tenaga pendidik perempuan sebanyak 546 orang. Dari total jumlah pendidik 14.213 orang.

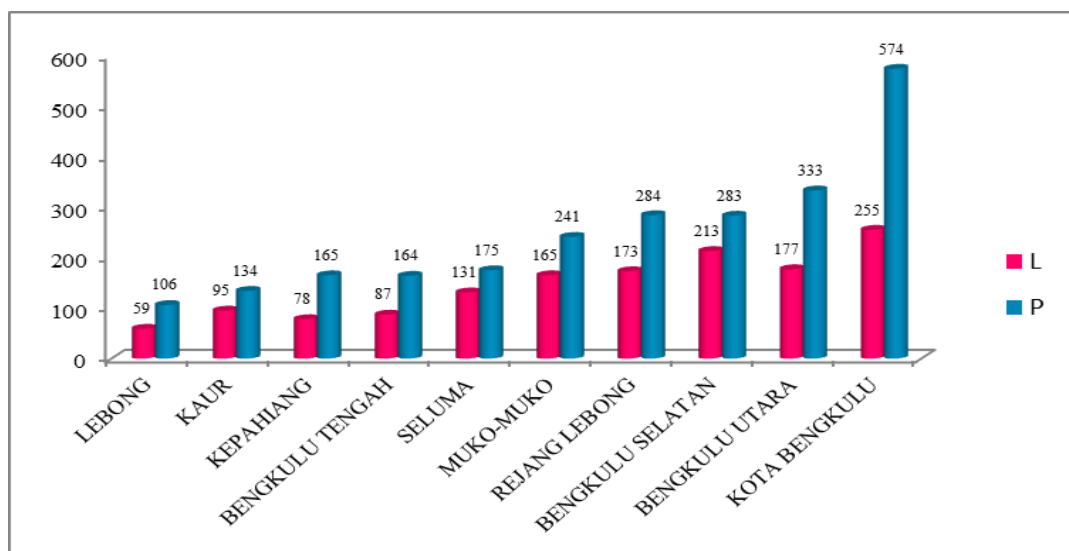
Grafik 3.B.8 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Dari grafik di atas jumlah tenaga pendidik tingkat Sekolah Menengah Pertama terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 1.165 orang (17,01%) dengan rincian tenaga pendidik laki-laki sebanyak 328 orang dan tenaga pendidikan perempuan sebanyak 837 orang. Sedangkan jumlah tenaga pendidik paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu berjumlah 353 orang (5,15%) dengan rincian tenaga pendidik laki-laki sebanyak 122 orang dan tenaga pendidik perempuan sebanyak 231 orang. Dari total jumlah tenaga pendidik 6.848 orang.

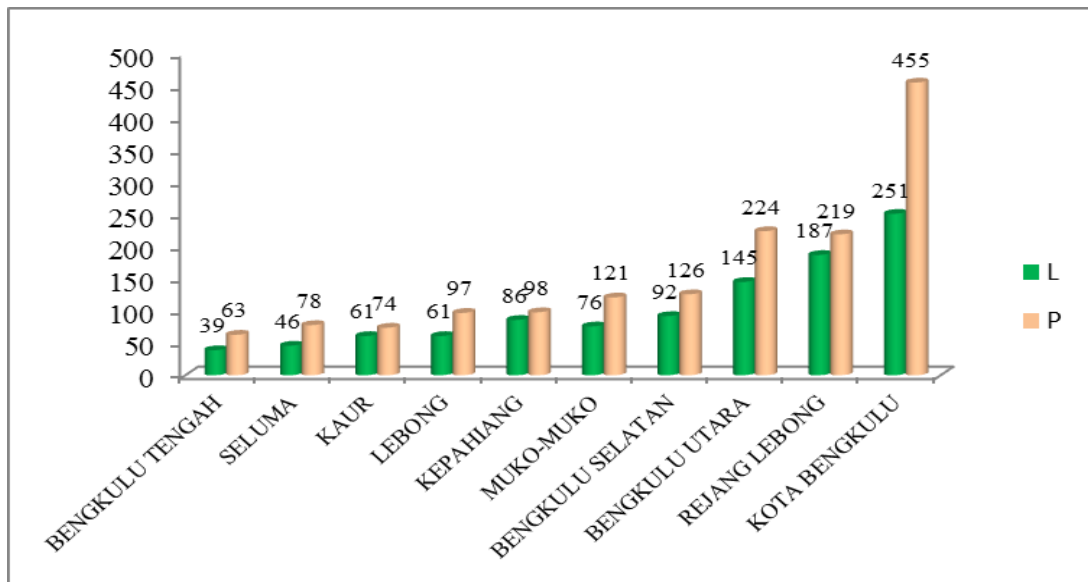
Grafik 3.B.9 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tenaga pendidik tingkat Sekolah Menengah Atas terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 829 orang (21,30%) dengan rincian tenaga pendidik laki-laki sebanyak 255 orang dan tenaga pendidikan perempuan sebanyak 574 orang. Sedangkan jumlah tenaga pendidik paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu berjumlah 165 orang (4,24%) dengan rincian tenaga pendidik laki-laki sebanyak 59 orang dan tenaga pendidik perempuan sebanyak 106 orang. Dari total jumlah tenaga pendidik tingkat Sekolah Menengah Atas sebanyak 3.892 orang.

Grafik 3.B.10 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



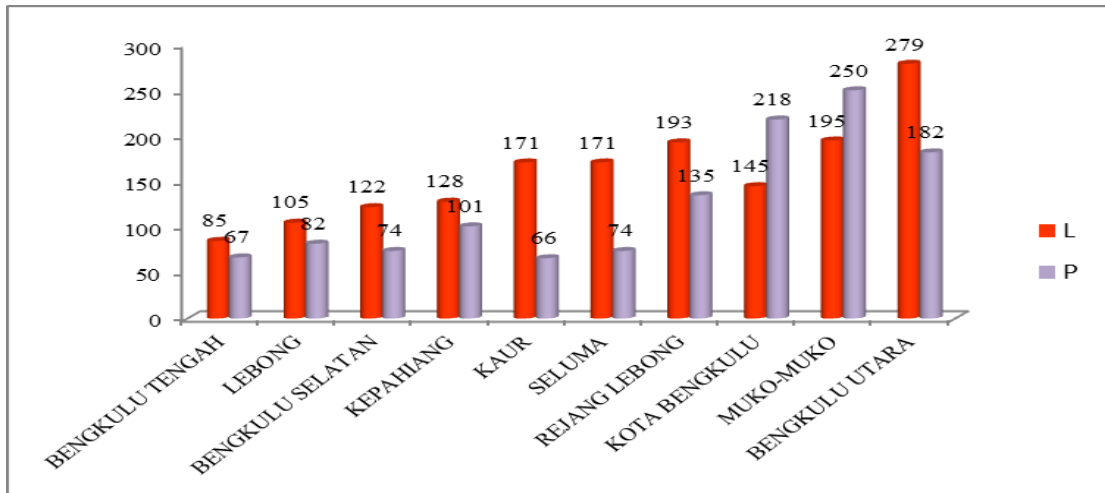
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tenaga pendidik tingkat Sekolah Menengah Kujuruan terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 706 orang (27,16 %) dengan rincian tenaga pendidik laki-laki sebanyak 251 orang dan tenaga pendidikan perempuan sebanyak 455 orang. Sedangkan jumlah tenaga pendidik paling sedikit berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu berjumlah 102 orang (3,92%) dengan rincian tenaga pendidik laki-laki sebanyak 59 orang dan tenaga pendidik perempuan sebanyak 102 orang. Dari total jumlah tenaga pendidik tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 2.599 orang.

Secara keseluruhan jumlah pendidik dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas/kejuruan berjumlah 27.552 orang dengan rincian laki-laki 9.040 orang dan perempuan sebanyak 18.512 orang.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. (UU No.20 THN 2003, PSL 39 (2))

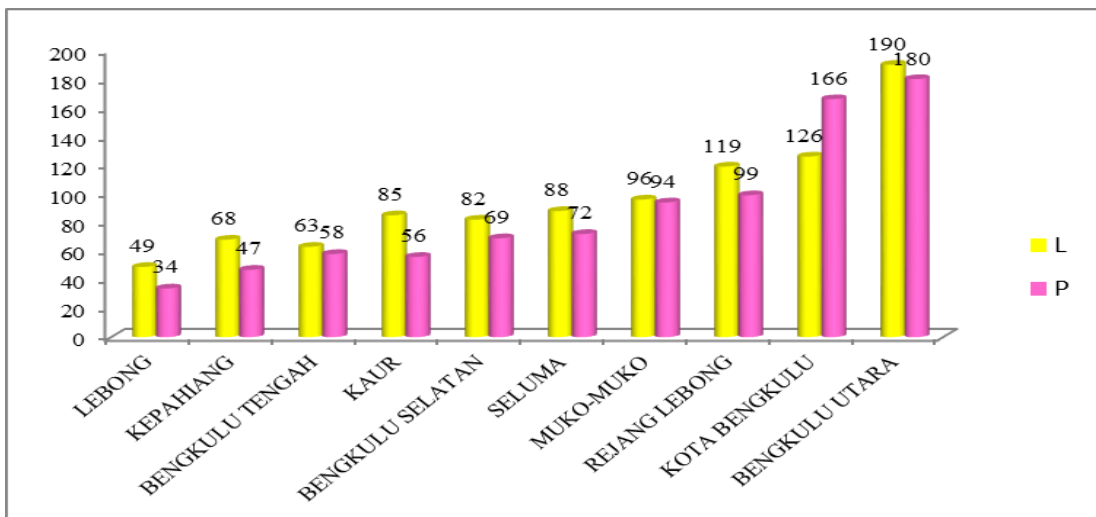
Grafik 3.B.11 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tenaga Kependidikan tingkat Sekolah Dasar terbanyak berada di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu sebanyak 461 orang (16,22 %) dengan rincian tenaga kependidikan laki-laki sebanyak 279 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 182 orang. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan tingkat sekolah dasar paling sedikit berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu berjumlah 152 orang (5,35%) dengan rincian tenaga kependidikan laki-laki sebanyak 85 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 67 orang. Dari total jumlah tenaga kependidikan tingkat Sekolah Dasar sebanyak 2.843 orang.

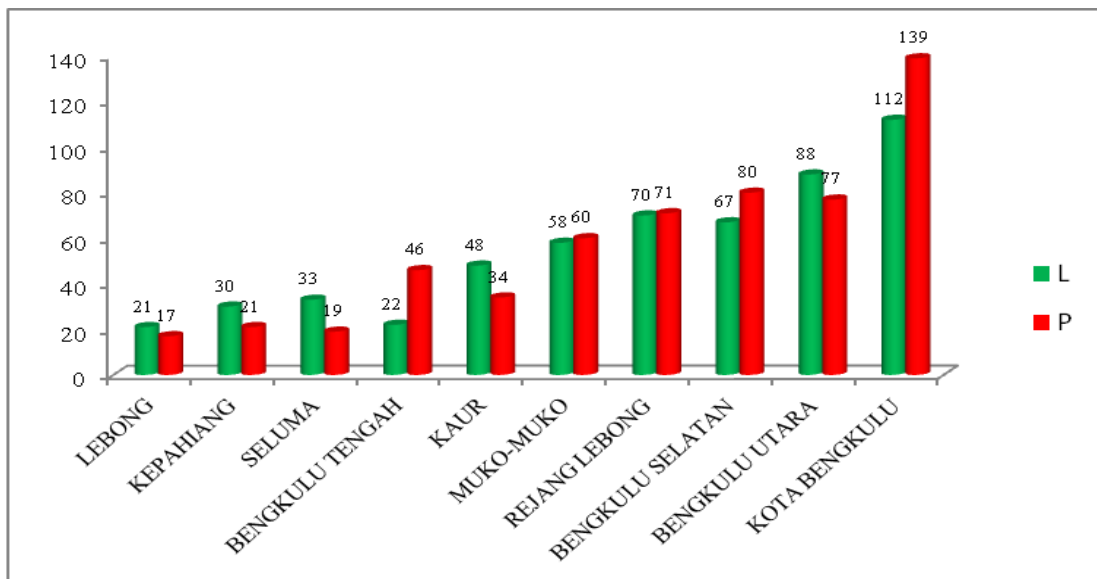
Grafik 3.B.12 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tenaga Kependidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama terbanyak berada di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu sebanyak 370 orang (20,10%) dengan rincian tenaga kependidikan laki-laki sebanyak 190 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 180 orang. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan tingkat sekolah dasar paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu berjumlah 83 orang (4,51%) dengan rincian tenaga kependidikan laki-laki sebanyak 85 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 67 orang. Dari total jumlah tenaga kependidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1.841 orang. dengan rincian tenaga kependidikan laki-laki sebanyak 966 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 875 orang.

Grafik 3.B.13 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018

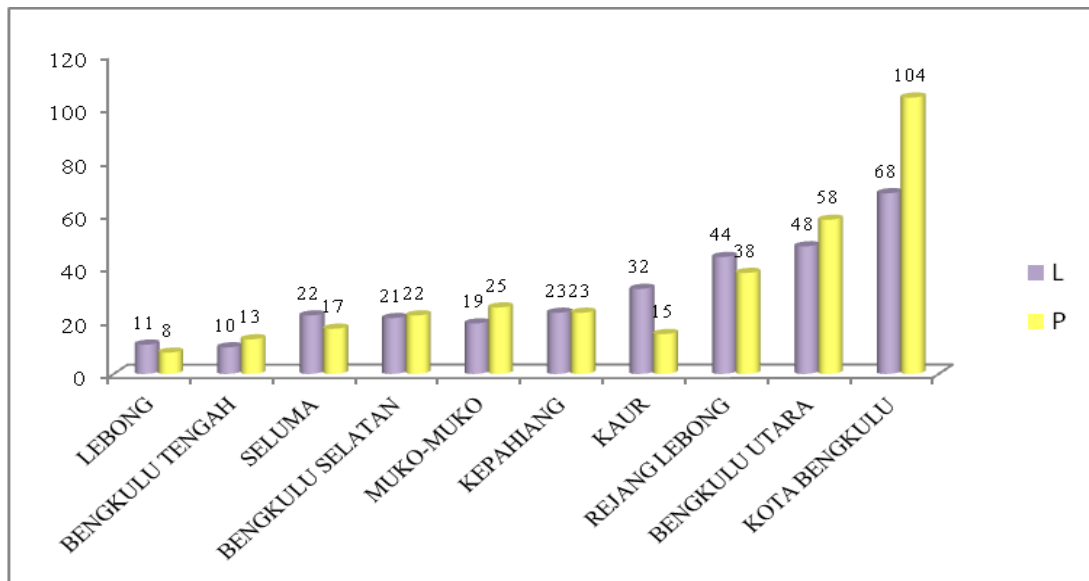


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tenaga kependidikan tingkat Sekolah Menengah Atas terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 251 orang (22,55%) dengan rincian tenaga kependidikan laki-laki sebanyak 112 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 139 orang. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan tingkat Sekolah Menengah Atas paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu berjumlah 38 orang (3,41%) dengan rincian tenaga kependidikan laki-laki sebanyak 21 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 17 orang. Dari total jumlah tenaga kependidikan tingkat Sekolah Menengah Atas sebanyak 1.113 orang, dengan rincian tenaga

kependidikan laki-laki sebanyak 549 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 564 orang.

Grafik 3.B.14 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



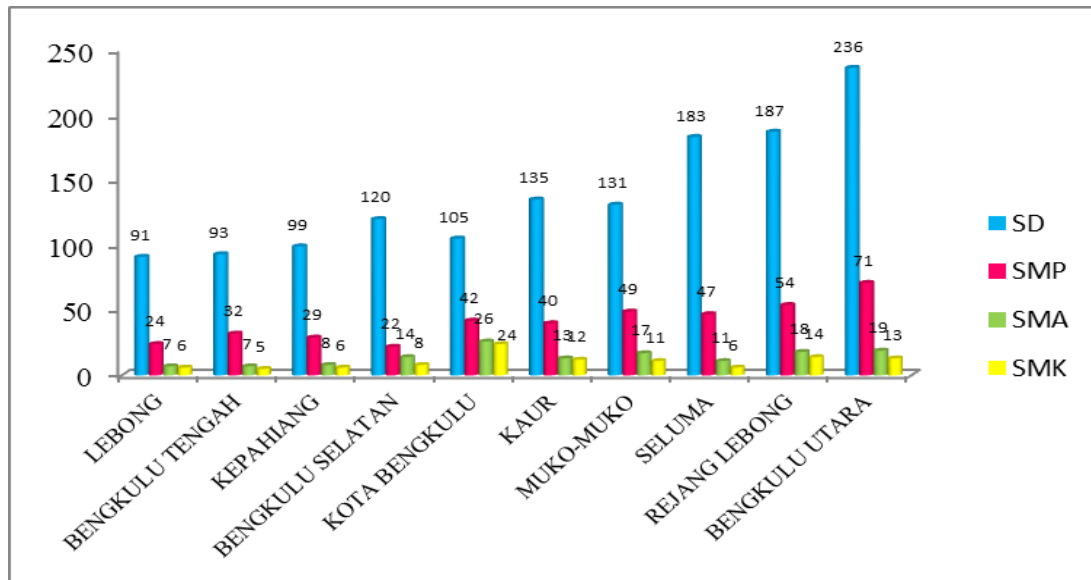
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tenaga kependidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 172 orang (27,70%) dengan rincian tenaga kependidikan laki-laki sebanyak 68 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 104 orang. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu berjumlah 19 orang (3,06%) dengan rincian tenaga kependidikan laki-laki sebanyak 11 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 8 orang. Dari total jumlah tenaga kependidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 621 orang, dengan rincian tenaga kependidikan laki-laki sebanyak 298 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 323 orang

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (UU No. 20 tahun 2003 psl 1, BAB 1 \diamond Ketentuan umum).

Merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (UU No.20 THN 2003, PSL 39 (1)).

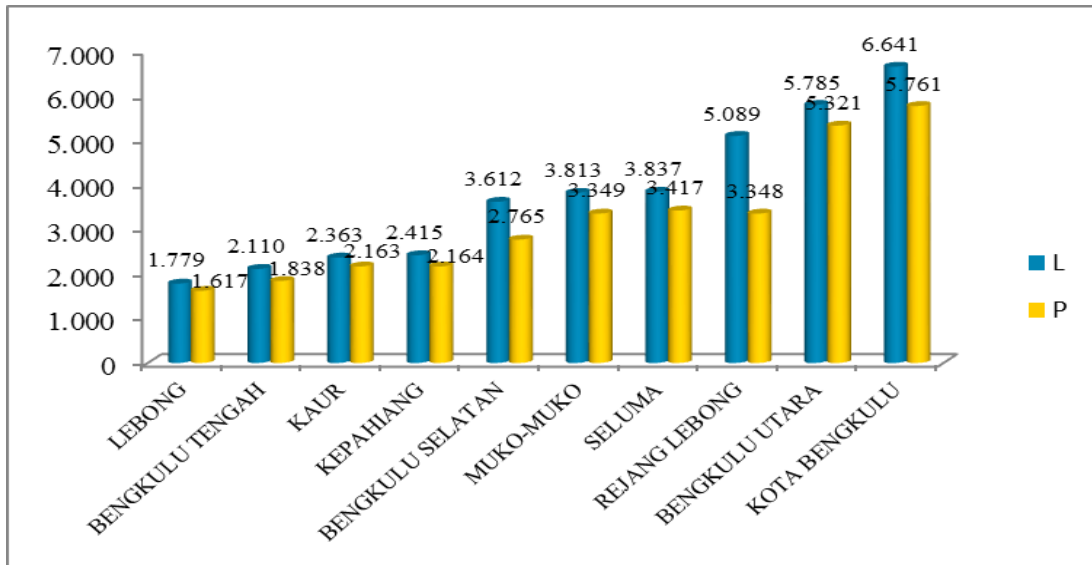
Grafik 3.B.15 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Untuk Lembaga Pendidikan dari Tingkat Sekolah Dasar s.d Sekolah Menengah Atas/Kejuruan yang paling banyak berada di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sebanyak 339 lembaga pendidikan, dengan rincian Lembaga Pendidikan Tingkat SD sebanyak 236, SMP sebanyak 71, SMA sebanyak 19, dan SMK sebanyak 13 lembaga pendidikan. Sementara lembaga pendidikan yang paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu sebanyak 128 lembaga pendidikan, dengan rincian Lembaga Pendidikan Tingkat SD sebanyak 91, SMP sebanyak 24, SMA sebanyak 7 dan SMK sebanyak 6 Lembaga Pendidikan. Dengan Total Lembaga Pendidikan sebanyak 2.046 lembaga, dengan rincian Lembaga Pendidikan tingkat SD sebanyak 1.380 lembaga, tingkat SMP sebanyak 410 lembaga, tingkat SMA sebanyak 140 lembaga, dan tingkat SMK sebanyak 105 lembaga.

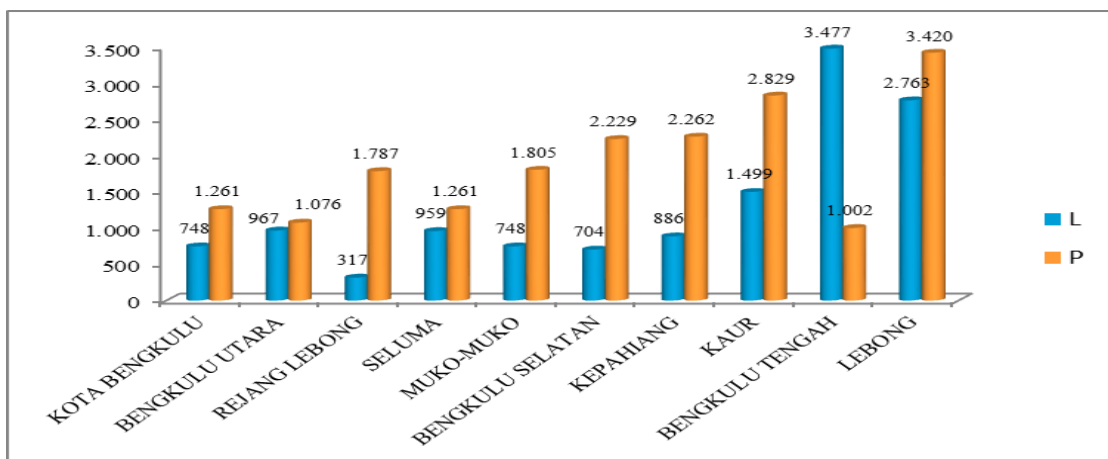
Grafik 3.B.16 Jumlah Tamatan Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tamatan Sekolah Dasar terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 12.402 orang (17,93%) dengan rincian tamat laki-laki sebanyak 6.641 orang dan tamatan perempuan sebanyak 5.761 orang. Sedangkan jumlah tamatan Sekolah Dasar paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu berjumlah 3.396 orang (4,91%) dengan tamatan laki-laki sebanyak 1.779 orang dan tamatan perempuan sebanyak 1.617 orang. Dari total jumlah tamatan tingkat Sekolah Dasar sebanyak 69.187 orang, dengan rincian tamatan laki-laki sebanyak 37.444 orang dan tamatan perempuan sebanyak 31.743 orang.

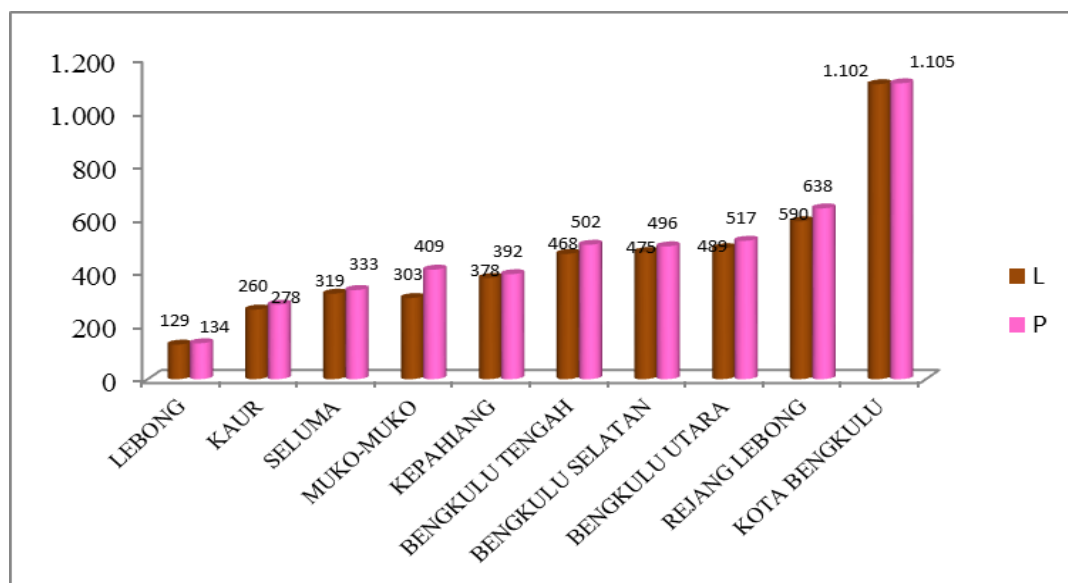
Grafik 3.B.16 Jumlah Tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tamatan Sekolah Menengah Pertama terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 6.183 orang (19,32%) dengan rincian tamat laki-laki sebanyak 2.763 orang dan tamatan perempuan sebanyak 3.420 orang. Sedangkan jumlah tamatan Sekolah menengah paling sedikit berada di Kabupaten Kepahiang, yaitu berjumlah 2.009 orang (6,28%) dengan tamatan laki-laki sebanyak 748 orang dan tamatan perempuan sebanyak 1.261 orang. Dari total jumlah tamatan tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 32.000 orang, dengan rincian tamatan laki-laki sebanyak 13.068 orang dan tamatan perempuan 18.932 orang.

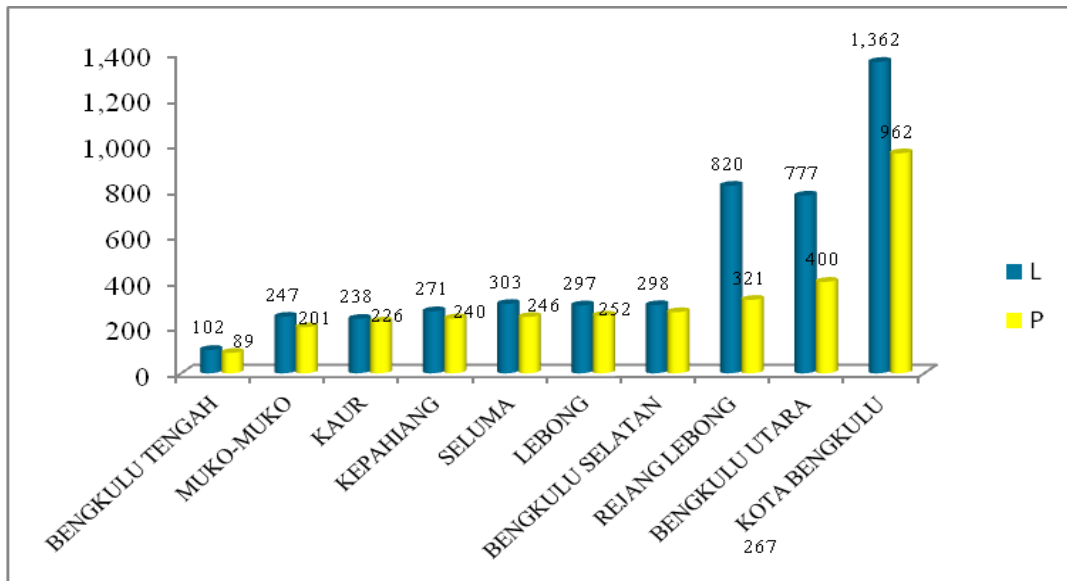
Grafik 3.B.17 Jumlah Tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tamatan Sekolah Menengah Atas terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 2.207 orang (23,69%) dengan rincian tamatan laki-laki sebanyak 1.102 orang dan tamatan perempuan sebanyak 1.105 orang. Sedangkan jumlah tamatan Sekolah menengah Atas paling sedikit berada di Kabupaten Lepong, yaitu berjumlah 263 orang (2,82%) dengan tamatan laki-laki sebanyak 129 orang dan tamatan perempuan sebanyak 134 orang. Dari total jumlah tamatan tingkat Sekolah Menengah Atas sebanyak 9.317 orang, dengan rincian tamatan laki-laki sebanyak 4.513 orang dan tamatan perempuan 4.809 orang.

Grafik 3.B.18 Jumlah Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

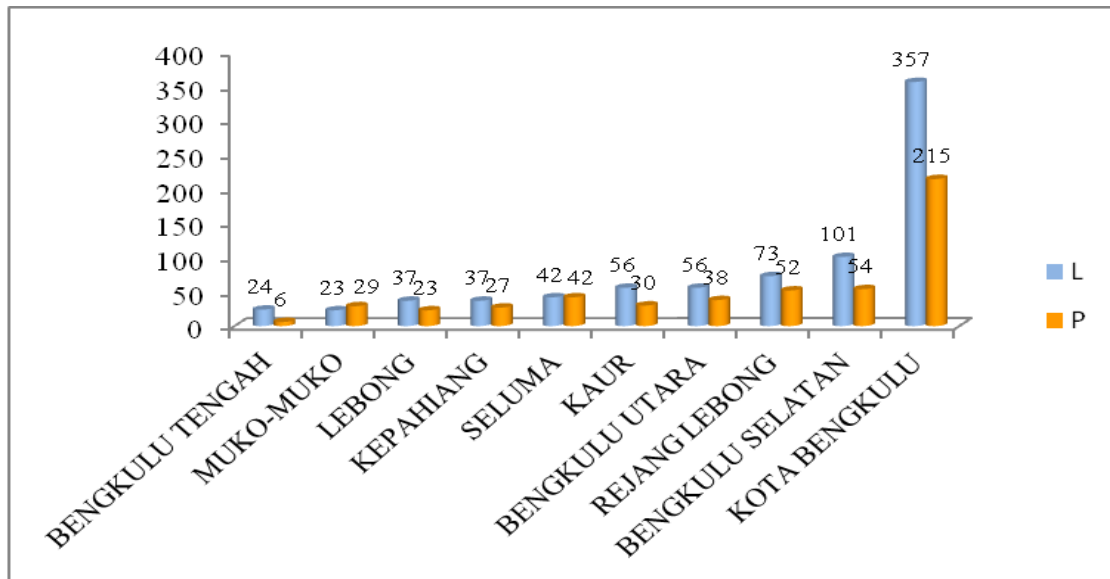


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tamatan Sekolah Menengah Kejuruan terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 2.324 orang (29,35%) dengan rincian tamatan laki-laki sebanyak 1.362 orang dan tamatan perempuan sebanyak 962 orang. Sedangkan jumlah tamatan Sekolah Menengah Kejuruan paling sedikit berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu berjumlah 191 orang (2,41%) dengan tamatan laki-laki sebanyak 102 orang dan tamatan perempuan sebanyak 89 orang. Dari total jumlah tamatan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 7.919 orang, dengan rincian tamatan laki-laki sebanyak 4.715 orang dan tamatan perempuan 3.204 orang.

C. Sosial

Grafik 3.C.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Tunggal Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Penyandang Disabilitas Tunggal terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu berjumlah 572 orang (43,27%) dengan Rincian penyandang disabilitas tunggal laki-laki sebanyak 357 orang dan penyandang disabilitas tunggal perempuan sebanyak 215 orang. Sedangkan penyandang disabilitas tunggal paling sedikit berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu berjumlah 30 orang (2,27%) dengan Rincian penyandang disabilitas tunggal laki-laki sebanyak 24 orang dan penyandang disabilitas tunggal perempuan sebanyak 6 orang. Dari total penyandang disabilitas sebanyak 1322 orang, yang terdiri penyandang disabilitas tunggal laki-laki sebanyak 806 orang (60,97%) dan Penyandang disabilitas tunggal perempuan sebanyak 516 orang (39,03%).

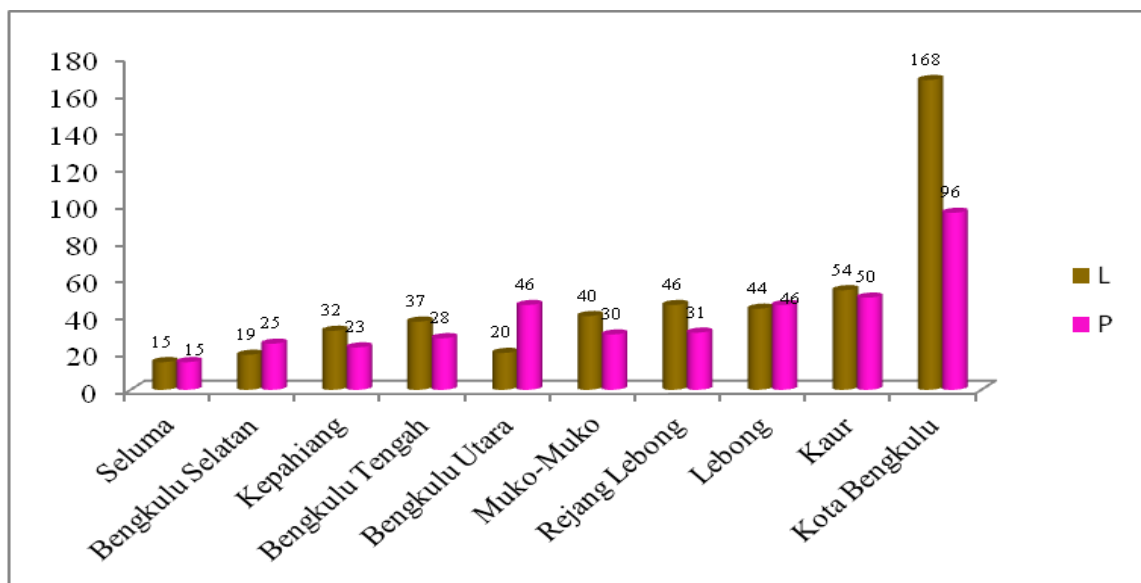
Sedangkan untuk Penyandang Disabilitas Ganda data hanya di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 20 orang dengan rincian penyandang disabilitas ganda laki-laki sebanyak 9 orang dan penyandang disabilitas ganda perempuan sebanyak 11 orang.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk

berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

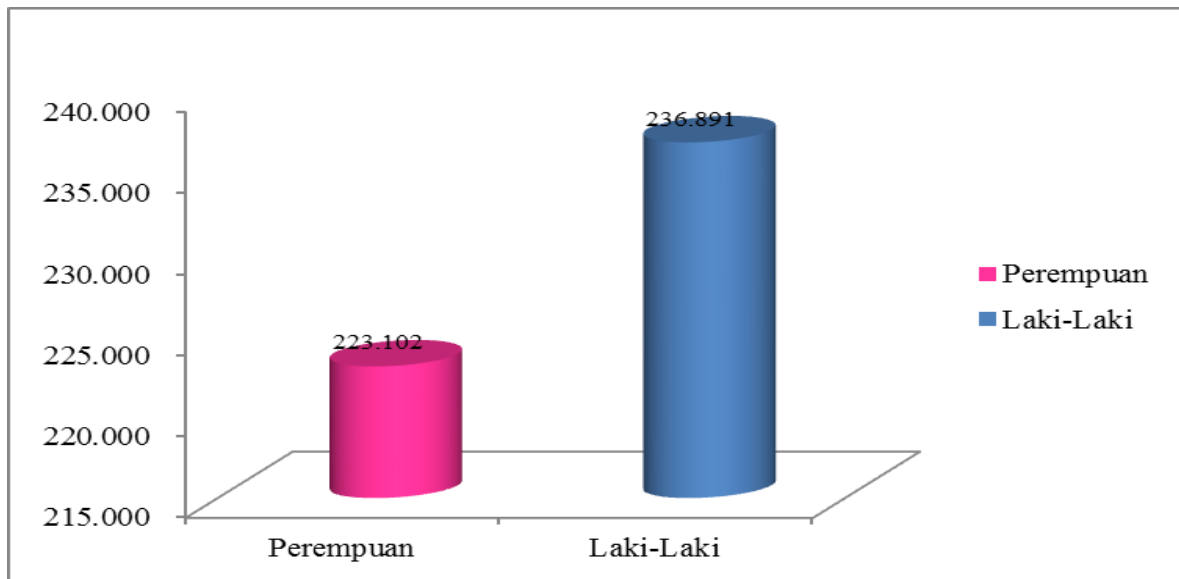
Grafik 3.C.2 Jumlah Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Jumlah anak terlantar terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu berjumlah 264 orang (30,52%) dengan rincian laki-laki sebanyak 168 orang dan perempuan sebanyak 96 orang. Sedangkan jumlah anak terlantar paling sedikit berada di Kabupaten Seluma, yaitu berjumlah 30 orang (3,47%) dengan rincian laki-laki sebanyak 15 orang dan penyandang perempuan sebanyak 15 orang. Dari total Anak Terlantar sebanyak 865 orang, yang terdiri laki-laki sebanyak 475 orang (54,91%) dan perempuan sebanyak 390 orang (45,09%).

Grafik 3.C.3 Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu

Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin di Provinsi Bengkulu, yaitu berjumlah 459.993 dengan rincian kepala rumah tangga perempuan sebanyak 223.102 (48,50%) dan kepala rumah tangga laki-laki sebanyak 236.891 (51,50%).

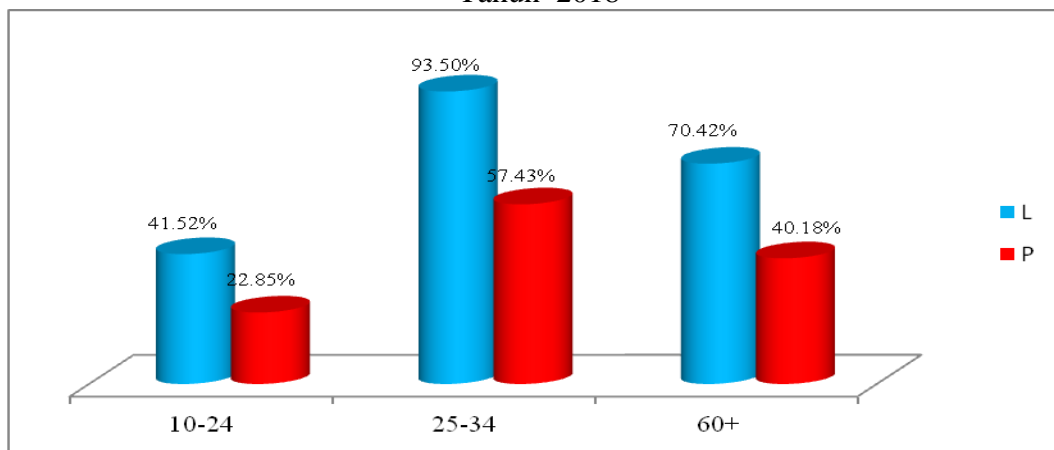
D. Ekonomi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki program prioritas, yakni *Three Ends*. Program *Three Ends* ini bertujuan untuk mengakhiri permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan anak, yakni (1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) Akhiri perdagangan orang; dan (3) Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. Program ini diharapkan dapat membangun kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak sebagai isu prioritas demi mewujudkan Indonesia yang ramah bagi perempuan dan tumbuh kembang anak.

Guna mewujudkan tujuan ketiga program *three ends*, yakni mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan, Kemen PPPA sejak 2016 melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui pengembangan Pelaku Industri Rumahan atau **IR. Industri Rumahan (IR)** yaitu suatu industri skala mikro, umumnya

memanfaatkan atau menghasilkan produk berupa barang jadi yang memberikan nilai tambah dan dikerjakan di rumah, secara khusus atau pun sebagai kerja paruh waktu. Pemerintah Pusat melalui Kemen PPPA mengeluarkan kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.

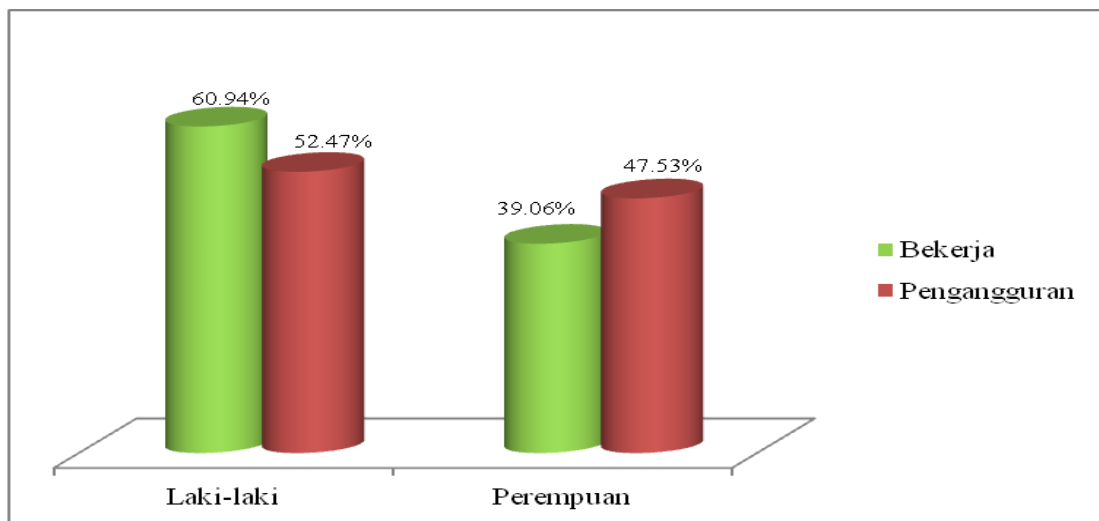
Grafik 3.D.1 Tingkat Angkatan Kerja Berdasarkan Usia dan jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Tingkat Angkatan Kerja tertinggi berada pada tingkat usia 25-34 tahun, yaitu untuk laki-laki 93,50 % dan perempuan sebanyak 57,43 %

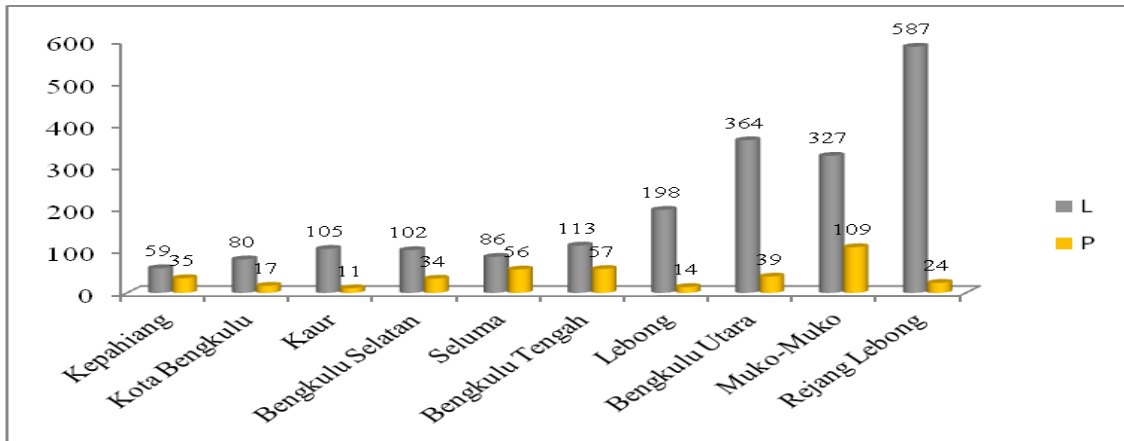
Grafik 3.D.2 Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Persentase Laki-Laki bekerja lebih tinggi dari perempuan bekerja, yaitu sebesar 60,94%, sementara untuk persentase penganggurn tertinggi adalah perempuan sebesar 47,53 %.

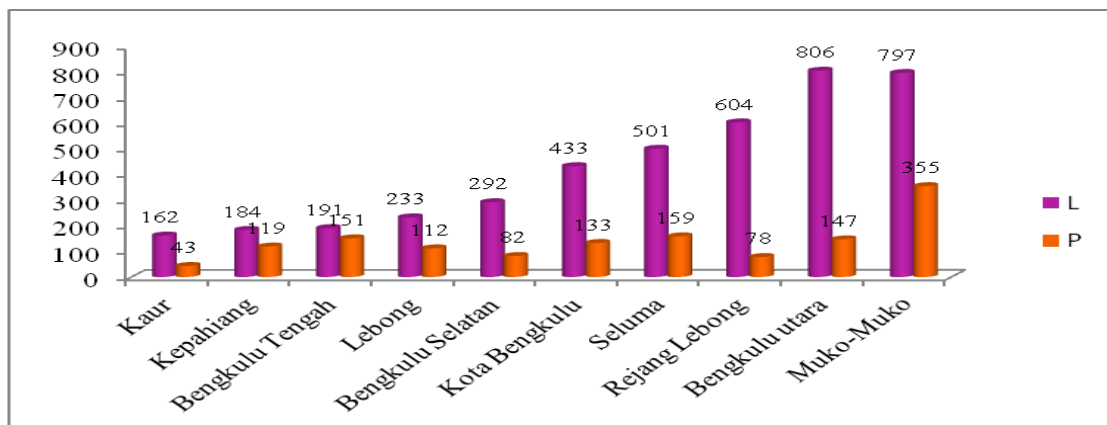
Grafik 3.D.3 Jumlah Pelaku Industri Kecil Agro Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Perindustri dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Jumlah Pelaku Industri Kecil Agro terbanyak ada di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu berjumlah 611 orang (25,28%) dengan Rincian laki-laki sebanyak 587 orang dan perempuan sebanyak 24 orang. Sedangkan Jumlah Pelaku Industri Kecil Agro paling sedikit berada di Kabupaten Kepahiang, yaitu berjumlah 94 orang (3,89%) dengan rincian laki-laki sebanyak 59 orang dan perempuan sebanyak 35 orang. Dari total Pelaku Industri Kecil Agro sebanyak 2.417 orang, yang terdiri laki-laki sebanyak 2021 orang (83,62%) dan perempuan sebanyak 396 orang (16,38%).

Grafik 3.D.4 Jumlah IKM Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber: Dinas Perindustri dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Jumlah IKM terbanyak ada di Kabupaten Muko-Muko, yaitu berjumlah 1152 orang (20,64%) dengan Rincian laki-laki sebanyak 797 orang dan perempuan sebanyak 355 orang. Sedangkan Jumlah IKM paling sedikit berada di Kabupaten Kaur, yaitu berjumlah 205 orang (3,67%) dengan rincian laki-laki sebanyak 162 orang dan perempuan sebanyak 43 orang. Dari total IKM sebanyak 5.582 orang, yang terdiri laki-laki sebanyak 4.203 orang (75,30%) dan perempuan sebanyak 1379 orang (24,70%).

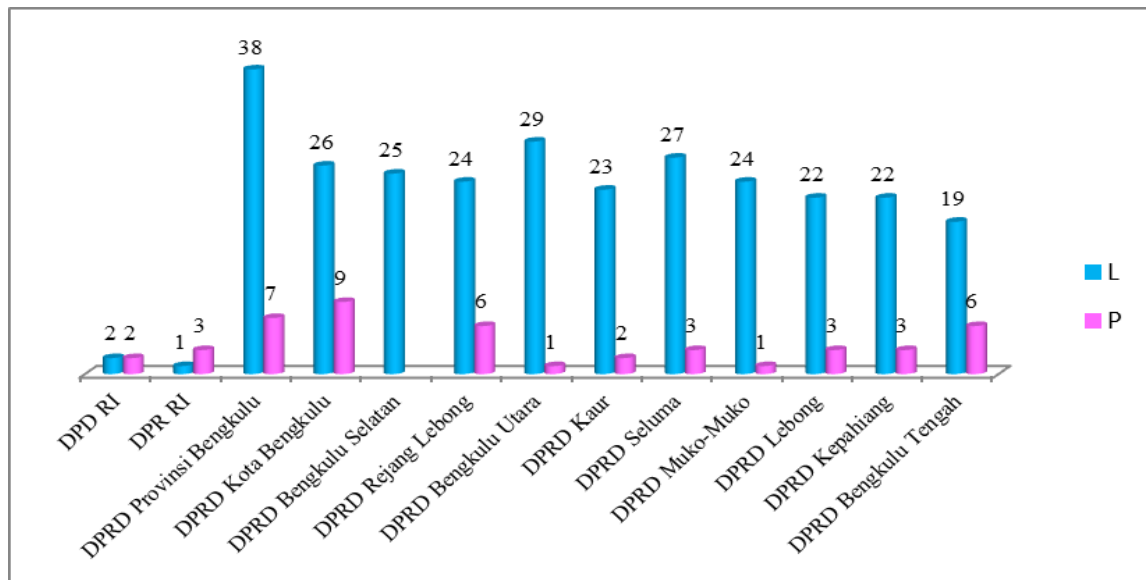
E. Politik dan Pengambilan Keputusan

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam politik agar dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang tersampaikan. Indonesia telah menerapkan peraturan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 yang berisi penetapan kuota minimal bakal calon anggota parlemen perempuan sebesar 30 % untuk DPR/DPRD.

UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan *zipper system*, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan.

Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik salah satunya disebabkan masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik. Institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu.

Grafik 3.E.1 Jumlah Anggota Legislatif Provinsi Bengkulu Menurut Jenis Kelamin Periode 2019 s.d 2024



Sumber : KPU Provinsi Bengkulu

Berdasarkan grafik diatas keterwakilan perempuan Provinsi Bengkulu dilembaga legislatif hanya 14,02 % yaitu sebanyak 46 orang dari total jumlah anggota Legislatif sebanyak 328 orang, sementara itu untuk Kota Bengkulu keterwakilan perempuan dilembaga legislatif sudah mencapai 25,7%, yaitu sebanyak 9 orang perempuan dari total jumlah anggota DPRD sebanyak 35 orang, dan yang tidak ada keterwakilan perempunya yaitu di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 3.E.1 Jumlah Pengurus Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Partai Politik	Jumlah Pengurus Parpol		Jumlah
		L	P	
1	Partai Amanat Nasional	21	17	38
2	Partai Bulan Bintang	26	14	40
3	Partai Demokrat	43	27	70
4	Partai Gerakan Indonesia raya	20	14	34
5	Partai Perindo	3	2	5
6	Partai Golongan Karya	71	28	99
7	Partai hati Nurani rakyat	35	11	46

8	Partai Keadila Peratuan Indonesia	13	9	22
9	Partai Beringin Karya	11	3	14
10	Partai Keadilan Sejahtera	13	9	22
11	Partai Kebangkitan Bangsa	21	17	38
12	Partai Garuda	6	3	9
13	Partai Persatuan Pembangunan	63	18	81
14	Partai Solidaritas Indonesia	4	3	7
15	Partai Nasde	13	10	23
16	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan	11	6	17
	Jumlah	374	191	565

Sumber: KPU Provinsi Bengkulu

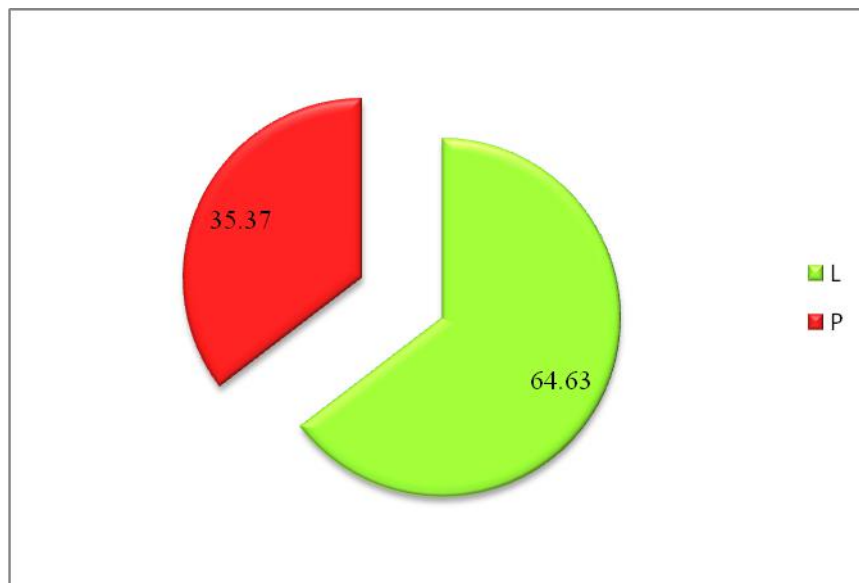
Tabel 3.E.2 Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH		JUMLAH
		L	P	
1	Provinsi	5,748	5,266	11,014
2	Bengkulu Utara	2,424	2,499	4,923
3	Bengkulu Selatan	2,193	2,591	4,784
4	Rejang Lebong	1,990	2,645	4,635
5	Seluma	1,842	1,757	3,599
6	Kota Bengkulu	1,804	3,450	5,254
7	Muko-Muko	1,541	1,809	3,350
8	Bengkulu Tengah	1,461	1,831	3,292
9	Kepahiang	1,363	1,731	3,094
10	Kaur	1,673	1,408	3,081
11	Lebong	1,275	1,322	2,597
	Jumlah	23,314	26,309	49,623

Sumber: BKD Provinsi & DP3APPKB Kabupaten/Kota

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terbanyak berada di bawah Pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu sebanyak 11.014 orang, dengan rincian Laki-laki sebanyak 5748 orang dan Perempuan 5266 orang. Sementara ASN paling sedikit di Kabupaten Lebong, yaitu sebanyak 2597 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 1275 dan perempuan sebanyak 2597.

Grafik 3.E.2 Persentase ASN yang Menduduki Eselon Tahun 2018



Sumber: BKD Provinsi & DP3APPKB Kabupaten/Kota

Jumlah ASN perempuan yang menduduki Jabatan Eselon sebanyak 35,37% (2738 orang), sedangkan laki-laki yang menduduki Jabatan eselon sebanyak 64,63% (5002). Dari total jumlah ASN yang menduduki Jabatan Eselon sebanyak 7740. Jumlah ASN perempuan yang menduduki Jabatan Eselon relative masih sedikit bila di bandingkan dengan jumlah laki-laki yang menduduki jabatan eselon, walaupun jumlah ASN secara keseluruhan lebih banyak perempuan, yaitu sebanyak 26.309 orang dari total ASN 49.623 orang.

F. Kesehatan

Tabel.3.F.1 Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Bayi Lahir Mati Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Bayi Lahir Hidup		Jumlah	Bayi Lahir Mati		Jumlah
		L	P		L	P	
1	Kaur	1,151	1,088	2,239	6	3	9
2	Rejang Lebong	2,455	2,445	4,900	6	4	10
3	Kota Bengkulu	3,416	3,434	6,850	6	7	13
4	Muko-muko	1,795	1,748	3,543	10	7	17
5	Bengkulu Selatan	1,361	1,307	2,668	13	6	19
6	Lebong	1,023	939	1,962	12	7	19
7	Bengkulu Utara	2,865	2,669	5,534	8	12	20
8	Kepahiang	1,237	991	2,228	16	4	20
9	Bengkulu Tengah	1,040	926	1,966	14	6	20
10	Seluma	1,578	1,663	3,241	14	13	27
Jumlah		17,921	17,210	35,131	105	69	174

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Bayi lahir hidup tertinggi berada di kabupaten Bengkulu Utara, yaitu sebanyak 2669 bayi dan Bayi Lahir Hidup terendah berada di Kabupaten Lebong yaitu sebanyak 1962. Bayi Lahir Mati tertinggi berada di Kabupaten Seluma, yaitu sebanyak 27 bayi, dan bayi lahir mati terendah berada di Kabupaten Kaur, yaitu sebanyak 9 orang.

Dalam demografi, istilah tingkat kelahiran atau *crude birth rate* (CBR) dari suatu populasi adalah jumlah kelahiran per 1.000 orang tiap tahun. Secara matematika, angka ini bisa dihitung dengan rumus $CBR = n/((p)(1000))$; di mana n adalah jumlah kelahiran pada tahun tersebut dan p adalah jumlah populasi saat penghitungan. Hasil penghitungan ini digabungkan dengan tingkat kematian untuk menghasilkan angka tingkat

pertumbuhan penduduk alami (alami maksudnya tidak melibatkan angka perpindahan penduduk (migrasi).

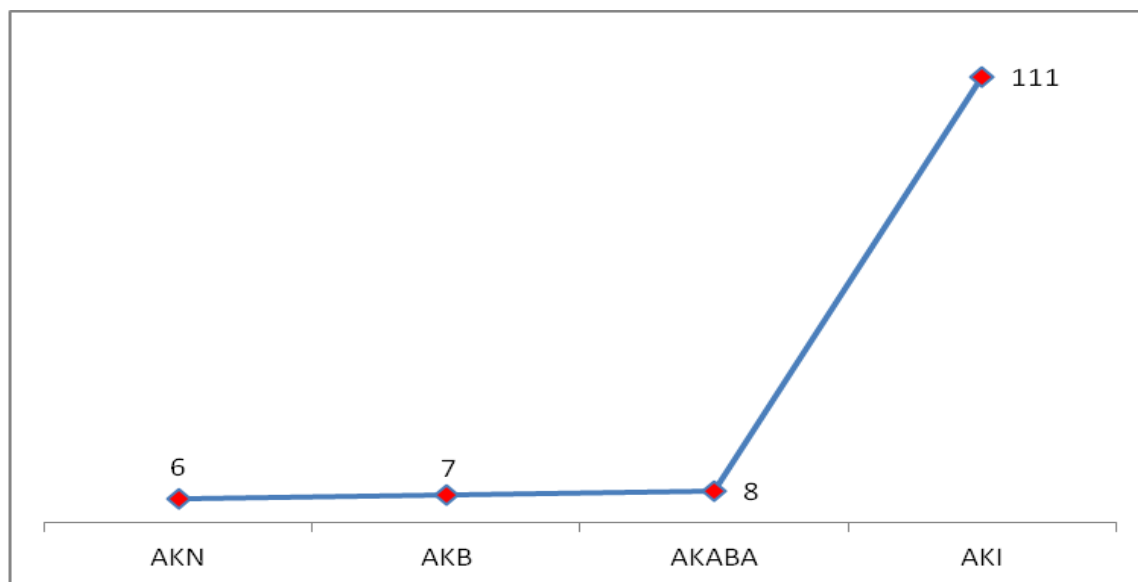
Indikator lain untuk mengukur tingkat kehamilan yang sering dipakai: tingkat kehamilan total - rata-rata jumlah anak yang terlahir bagi tiap wanita dalam hidupnya. Secara umum, tingkat kehamilan total adalah indikator yang lebih baik untuk tingkat kehamilan daripada CBR, karena tidak terpengaruh oleh distribusi usia dari populasi.

Lahir hidup adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung/denyut tali pusat atau gerakan-gerakan otot. peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan dan setelah pemisahan itu terjadi, hasil konsepsi bernafas dan mempunyai tanda-tanda kehidupan lainnya, seperti denyut jantung, detak tali pusat, atau gerakan-gerakan otot, tanpa memandang apakah tali pusat sudah dipotong atau belum (*LIVE BIRTH*).

Lahir hidup (*live birth*) adalah anak yang dilahirkan hidup (menunjukkan tanda-tanda kehidupan) pada saat dilahirkan, tanpa memperhatikan lamanya di kandungan, walaupun akhirnya meninggal dunia. Suatu kelahiran disebut “lahir hidup” (*live birth*) apabila pada waktu lahir terdapat tanda-tanda kehidupan, misalnya menangis, bernafas, jantung berdenyut. Jika tidak ada tanda-tanda kehidupan tersebut disebut “lahir mati” (*still birth*) yang tidak diperhitungkan sebagai kelahiran dalam fertilitas.

Lahir Mati adalah keadaan bila kematian bayi terjadi sebelum lahir, tetapi setelah kehamilan 20 minggu atau lebih. Kebanyakan kematian sewaktu bayi masih di dalam rahim. Namun, 10 % terjadi sebelum persalinan. Menurut kamus kesehatan Kelahiran mati (*stillbirth*) adalah peristiwa atau kondisi yang terjadi sebelum espulsi lengkap atau ekstraksi yaitu bayi mengalami kematian, hal ini hasil fertilisasi dari ibu pada atau setelah usia kehamilan 20 minggu. Kematian ditandai dengan fakta bahwa, setelah pemisahan tersebut, janin tidak bernapas atau menunjukkan bukti kehidupan lainnya seperti detak jantung, denyut tali pusat, atau gerakan otot sukarela tertentu. Jika janin meninggal sebelum ke-28, disebut aborsi atau keguguran.

Grafik.3.F.1 Angka Kematian (AKN, AKB, AKABA, dan AKI)
Tahun 2018



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Angka Kematian Neonatal di Provinsi Bengkulu sebesar 6 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi sebesar 7 per 1000 kelahiran hidup, angka Kematian Balita sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup, dan angka kematian Ibu sebesar 111 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Sedangkan Angka Kematian Post-NeoNatal dan Angka Kematian Anak serta Kematian Balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka Kematian Bayi dibagi menjadi dua :

1. Angka Kematian Neo Natal

Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

2. Angka kematian Post Neo-natal

Angka Kematian Post Neo-natal atau *Post Neo-natal Death Rate* adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur antara 1 bulan sampai dengan kurang 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Angka Kematian Anak

Angka Kematian Anak adalah jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi Angka Kematian Anak tidak termasuk kematian bayi.

Angka kematian Balita (AKaBa)

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi)

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Informasi mengenai tingginya Maternal Mortality Rate akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan,

penyiapan sistim rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Tabel.3.F.2 Jumlah Gizi Buruk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Gizi Buruk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Bengkulu Selatan	1	4	5
2	Rejang Lebong	3	4	7
3	Bengkulu Utara	6	2	8
4	Kaur	1	1	2
5	Seluma	3	1	4
6	Muko-muko	3	3	6
7	Lebong	2	1	3
8	Kepahiang	11	5	16
9	Bengkulu Tengah	1	1	2
10	Kota Bengkulu	1	1	2
Jumlah		32	23	55

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Kasus gizi buruk terbanyak berada di Kabupaten Kepahiang, yaitu sebanyak 16 orang, sedangkan jumlah kasus gizi buruk paling sedikit berada di Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu, yaitu masing-masing sebanyak 2 orang. Dengan total kasus gizi buruk sebanyak 55 orang, dengan rincian 32 orang laki-laki dan 23 orang perempuan.

Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana mengalami kurang gizi yang diketahui berdasarkan pengukuran antropometri seperti penambahan berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkaran kepala, lingkaran lengan dan lain-lain.

Macam-macam gizi buruk pada anak:

- **Kwashiorkor**

Kwashiorkor atau busung lapar merupakan salah satu jenis dari gizi buruk yang diakibatkan karena kurangnya konsumsi protein. Seorang anak yang mengalami kondisi ini memiliki ciri yang khas yaitu terdapat edema (bengkak) pada seluruh tubuh sehingga tampak gemuk. Apabila bengkak itu ditekan akan meninggalkan bekas seperti lubang.

Untuk mendeteksi anak yang mengalami busung lapar, bisa dilakukan dengan menimbang berat badan anak secara teratur. Jika perbandingan berat badan dan umurnya di bawah 60 persen maka anak tersebut bisa dikatakan terindikasi busung lapar.

- **Marasmus**

Marasmus merupakan salah satu bentuk kekurangan gizi buruk yang sering dialami oleh balita karena kurangnya konsumsi energi. Penyebabnya pun beragam, seperti kurang makan, mengalami infeksi di tubuhnya, bawaan lahir, prematuritas, serta faktor lingkungan.

Kondisi ini biasanya dialami oleh anak usia 0-2 tahun. Ciri-ciri umum anak yang mengalami marasmus yaitu memiliki berat badan kurang dari 60 persen berat badan sesuai dengan usianya, suhu tubuh yang rendah, dan kulit tubuh yang longgar hingga hanya terlihat seperti tulang yang terbungkus kulit saja. Selain itu, wajah anak akan terlihat lebih tua dan mengalami diare kronik atau susah buang air kecil.

- **Marasmus – Kwashiorkor**

Marasmik-kwashiorkor merupakan gabungan antara marasmus dan Kwashiorkor. Kondisi ini cukup serius dikarenakan kondisi marasmus maupun kwashiorkor menyerang tubuh anak. Bisa digambarkan anak yang mengalami kondisi ini memiliki berat badan kurang dari 60 persen berat badan yang sesuai dengan usianya, kemudian disertai dengan pembengkakan yang tidak mencolok.

Dampak kondisi ini bagi anak adalah penurunan tingkat kecerdasan, rabun senja, dan anak lebih rentan terkena penyakit infeksi. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan makanan yang bergizi berupa sayur mayur, buah-buahan, makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan jagung serta makanan yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging.

- **Stunting/Pendek**

Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek.. *Stunting* terjadi akibat kekurangan gizi dan penyakit berulang dalam waktu lama pada masa janin hingga 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Anak dengan *stunting* memiliki IQ 5-10 poin lebih rendah dibanding dengan anak yang normal.

BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bentuk ketidakadilan gender:

a. Sub Ordinasi

Subordinasi adalah kondisi dimana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat (lebih rendah) dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik. Contohnya didalam sebuah keluarga biasanya perempuan tidak mendapat kesempatan untuk turut mengambil keputusan atau mengeluarkan pendapat.

b. Stereotif Gender

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe bersumber dari perbedaan gender. Misalnya, stereotipe yang berawal dari asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri

c. Beban Ganda

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting, di sisi lain, sesungguhnya dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan. Perempuan memiliki peran domestik dan fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, hamil, melahirkan, menyusui), kerja produktif (mencari nafkah, kadang menjadi pencari nafkah utama).

d. Marginalisasi

Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat. Contohnya, karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik/reproduktif, lebih diarahkan sebagai pengurus rumah tangga, maka dalam perkawinan ia menjadi tergantung secara ekonomi kepada laki-laki.

e. Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan adalah ‘Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat **kesengsaraan** atau **penderitaan** perempuan, secara **fisik, seksual, psikologis**, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestic.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi

Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Rights of The Child merupakan komitmen Negara, begitu pula konvensi hak-hak anak Indonesia, pasal 5 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu hak-hak anak Indonesia ditentukan oleh komitmen negaratersebut di atas, yaitu:

1. Hak Kelangsungan Hidup (Survival) adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang baik
2. Hak Perlindungan (Protection) adalah perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.

3. Hak Tumbuh Kembang (Development), adalah hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi (Participation) adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak
5. Hak Anak Atas Identitas, adalah setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

A. Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Adalah :

- Perempuan yang berkonflik dengan hukum
- Perempuan sebagai korban;
- Perempuan sebagai saksi;
- Perempuan sebagai pihak.

Hak Perempuan Berhadapan Hukum

- Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan
- Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
- Hak mendapatkan pendamping
- Hak mendapatkan penerjemah
- Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- Hak dirahasiakan identitasnya
- Hak mendapatkan restitusi
- Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- Hak mendapatkan nasehat hukum
- Hak atas pemulihan

Berdasarkan pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017, dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim tidak diperbolehkan :

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan mengandung stereotip gender.

Dalam PERMA ini lebih ditekankan dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, agar memperhatikan dan mempertimbangkan perihal kesetaraan gender, perlindungan yang setara, non diskriminasi.

Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Bengkulu (sumber: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu):

- a. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum menurut Tindak Pidana
Berdasarkan tindak pidana Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebanyak 222 orang dengan rincian yaitu: pencurian 41 orang, Asusila 8 orang, narkoba 67 orang, Lalulintas 1 orang, penggelapan 11 orang, memeras/mengancam 2 orang, kekerasan 1 orang, pembunuhan 1 orang, mata uang 2 orang, penipuan 18 orang, penganiayaan 12 orang, perbuatan tidak menyenangkan 1 orang dan lain-lain sebanyak 57 orang.
- b. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum menurut Peraturan Perundangan yang diterapkan dalam perkara
Berdasarkan peraturan perundangan yang diterapkan dalam perkara jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebanyak 186, dengan rincian menurut Undang-undang Perlindungan Anak sebanyak 2 orang, KUHP sebanyak 55 orang, lainnya sebanyak 129 orang.

B. Anak Berhadapan dengan Hukum

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana
2. Korban tindak pidana
3. Saksi suatu tindak pidana

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. (Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004).

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.

Anak Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Bengkulu (sumber: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu):

- a. Jumlah anak berhadapan dengan hukum sebanyak 431 orang dengan rincian, laki-laki sebanyak 429 orang dan perempuan sebanyak 2 orang
- b. Jumlah ABH Menurut Jenis Tindak Pidana
Pencurian sebanyak 247 orang, asusila 51 orang, sjaam 5 orang, narkoba 17 orang, penadahan 2 orang, laka lantas 56 orang, penggelapan 2 orang, pembunuhan 1 orang, mata uang 2 orang, penganiayaan 43 orang, dan perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 1 orang.
- c. Jumlah ABH dengan Hasil Pendampingan Diversi Menurut Jenis Kelamin
Laki-laki sebanyak 171 orang, perempuan sebanyak 1 orang
- d. Jumlah ABH yang di Putus Pengadilan Menurut Jenis Kelamin
Laki-laki sebanyak 258 orang, dan perempuan sebanyak 1 orang
- e. Jumlah ABH Penghuni Lapas Menurut Jenis Kelamin
Laki-laki sebanyak 97 orang, perempuan sebanyak 1 orang.

C. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

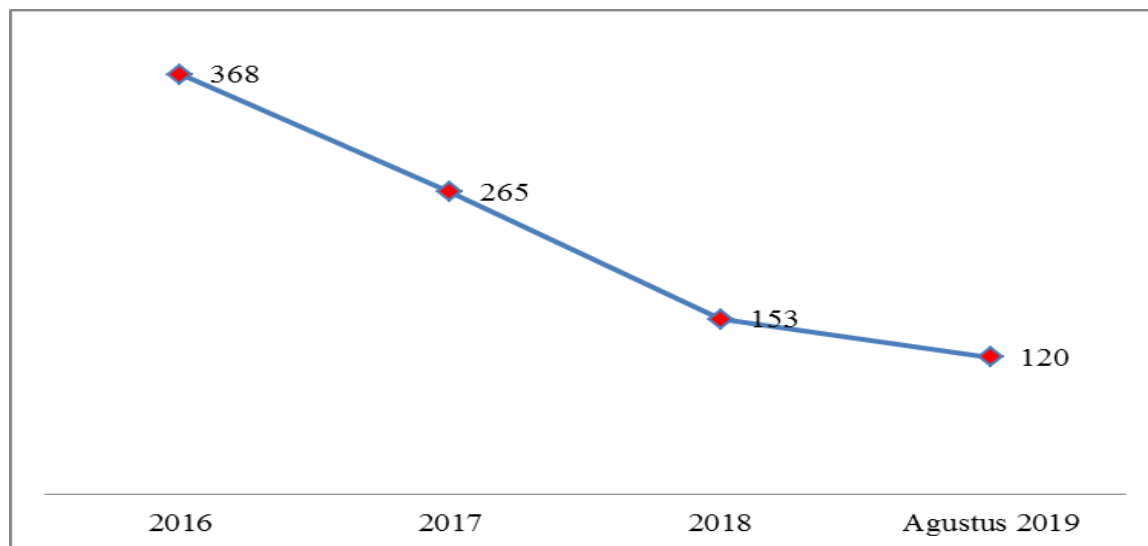
Kekerasan Terhadap Perempuan

Adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. (pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993).

Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak.

Grafik 4 C I. Trend Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 s.d Agustus 2019

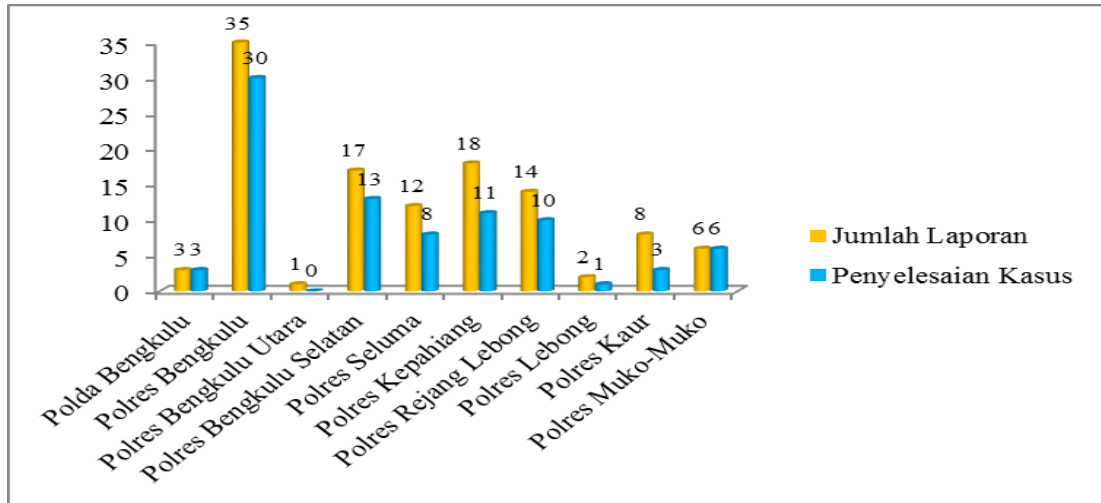


Sumber: Aplikasi SIMFONI PPA (2016 s.d 2017) dan UPPA POLDA Bengkulu (2018 s.d Agustus 2019)

Bila dilihat dari grafik, jumlah kasus kekerasan cenderung menurun selama 3 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2016 ada 368 kasus kekerasan, 2017 sebanyak 265 kasus kekerasan, 2018 sebanyak 153 kasus kekerasan dan pada tahun 2019 sampai bulan agustus 2019 sebanyak 120 kasus kekerasan.

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Grafik 4 C 2 Jumlah Laporan dan Penyelesaian Kasus KDRT
Tahun 2018

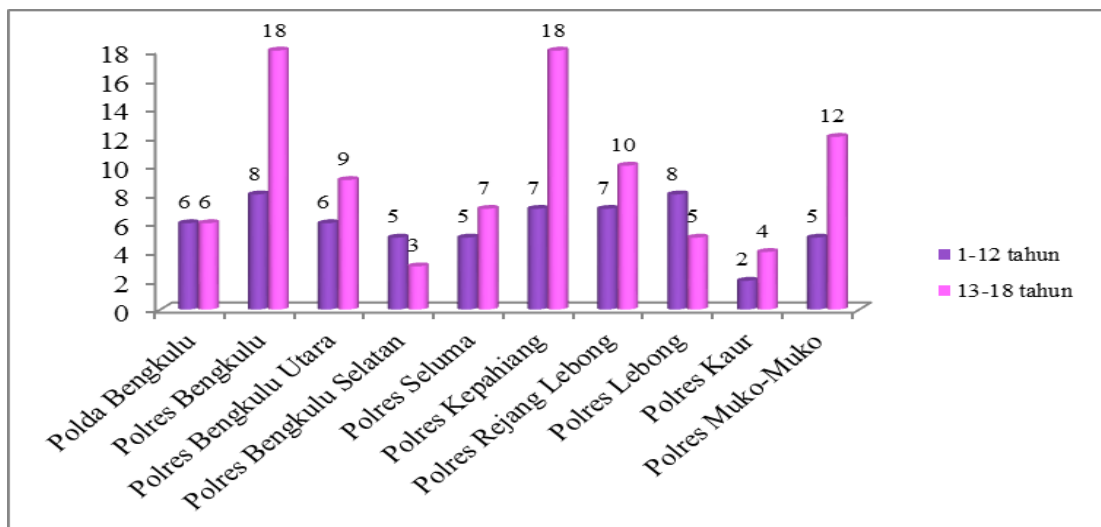


Sumber: Polda Bengkulu

Dari data di atas jumlah laporan terbanyak kasus KDRT ada di Polres Bengkulu, yaitu sebanyak 35 laporan dengan penyelesaian laporan sebanyak 30 laporan. Dan laporan paling sedikit ada di Polres Bengkulu Utara, yaitu hanya 1 laporan. Dengan total laporan sebanyak 116 laporan dan penyelesaian laporan sebanyak 85 laporan.

- Kekerasan Seksual Terhadap Anak

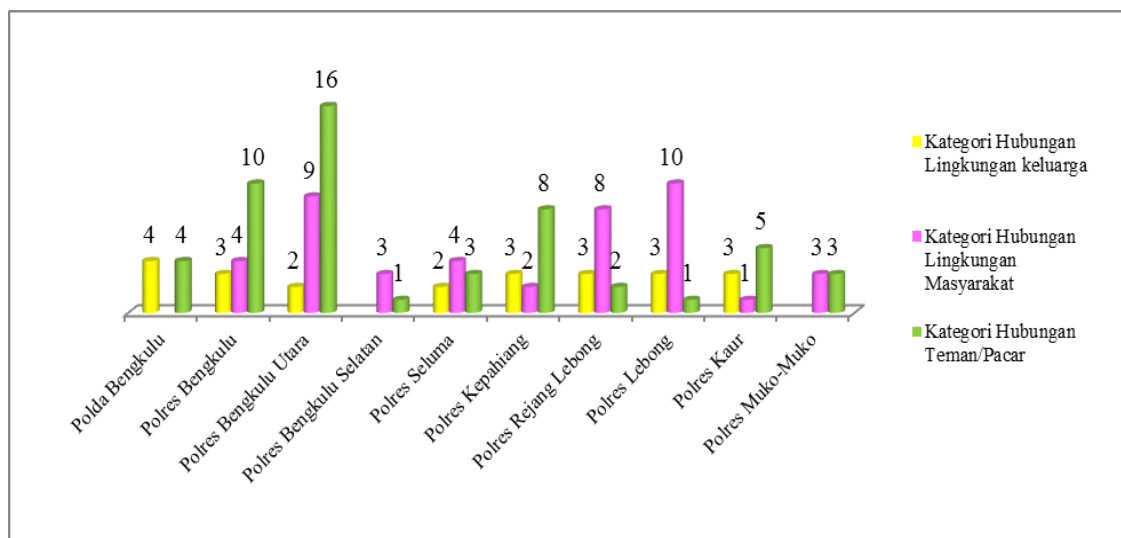
Grafik 4 C 3 Jumlah Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak
Tahun 2018



Sumber: Polda Bengkulu

Korban kejahatan seksual terhadap anak terbanyak berada di wilayah Polres Bengkulu, yaitu berjumlah 26 orang anak. dari total jumlah korban kejahatan seksual terhadap anak sebanyak 151 orang anak, dengan rincian usia 1 s.d 12 tahun sebanyak 59 orang anak dan korban usia 13 s.d 18 tahun sebanyak 92 orang anak. Ini menunjukkan masih tinggi kejahatan seksual terhadap anak di Provinsi Bengkulu.

Grafik 4 C 4 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2019 (s.d Agustus 2019)



Sumber: Polda Bengkulu

Jumlah Kekerasan terbanyak untuk tahun 2019 berada di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu sebanyak 27 kasus kekerasan, yang paling sedikit berada di Kabupaten Muko-muko, yaitu sebanyak 6 kasus kekerasan. Dengan Total Kekerasan sebanyak 120, dengan rincian 23 kekerasan kategori hubungan lingkungan keluarga, 44 kategori hubungan lingkungan masyarakat, dan 53 kategori hubungan teman / pacar.

BAB V

PERANGKAT HUKUM DAN KELEMBAGAAN

Salah satu capaian kesetaraan gender adalah penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan diruang publik maupun ruang pribadi .Hal tersebut sejalan dengan Undang- undang Hak asasi Manusia bahwa setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman, salah satunya perlindungan diri pribadi dari tindak kejahatan. Sebagai upaya untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, gerakan perempuan di daerah pernah memiliki pengalaman mendesak pembuatan Perda Pencegahan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Dengan menggunakan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Propinsi), seluruh elemen gerakan perempuan, baik yang berada di dalam Lembaga Legislatif, Eksekutif merancang Raperda. UU PTPPO dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan:

1. RAN Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, yang dasarnya adalah Keppres No. 87 Tahun 2002
2. RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, didasari oleh Keppres No. 88 Tahun 2002; dan
3. RAN Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dasarnya Keppres No. 59 tahun 2002.
4. RAN Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra No. 25 Tahun 2009.

A. Perangkat Hukum

Dalam tata cara pelaksanaan ditemukan masalah. Pertama, Perda belum implementasi, atau belum dijadikan acuan penyelesaian kasus. Kedua, aparat penegak hukum kurang paham soal perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga melalui kerjasama dengan seluruh sektor terkait baik di Provinsi Bengkulu maupun di Kabupaten/Kota telah diterbitkan perangkat hukum di tingkat provinsi, yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No.21 tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Bengkulu
2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No.22 tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak di Bengkulu.

3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No.2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Bengkulu
6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Atas Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak Provinsi Bengkulu
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Bengkulu.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksana Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
10. SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.751 tahun 2003 tentang Tim Penanganan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
11. SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.204.XXXV tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Anak daerah
12. SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.L.163.XXXV tahun 2013 Pembentukan Tim P2TP2A Provinsi Bengkulu
13. SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.P.52.III tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas TPPO tanggal 6-02-2013
14. SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.R.204.XXXV tahun 2014 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu
15. SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.L.157.XXXV.tahun 2013 tentang pembentukan Gugus Tugas KLA Provinsi Bengkulu

16. SK Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor P.125. DP3A&PPKB Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Data Gender dan Anak Provinsi Bengkulu.
17. SK Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor P.139. DP3A&PPKB Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Anak Provinsi Bengkulu
18. Mou antara Gubernur Bengkulu dengan Bupati/Walikota Se-Provinsi Bengkulu Nomor : 02/MOU/DP3A&PPKB/2017 Tanggal 12 Mei 2017 tentang Percepatan Perwujudan Kota Layak Anak.
19. Mou antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : 067/129A/DP3A&PPKB/VII/2017 dan Nomor : 48/HK.03.01/J/2017 Tentang Peningkatan Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, melalui Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Provinsi Bengkulu.
20. Nota Kesepahaman antara DP3A&PPKB Provinsi Bengkulu dengan Lembaga Organisasi Peduli Perempuan dan Anak Provinsi Bengkulu Nomor:05/NK.DP3A&PPKB/2017, tanggal 14 September 2017 Tentang Pencegahan Penanganan dan Pengentasan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
21. Nota Kesepahaman antara DP3A&PPKB Provinsi Bengkulu dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu Nomor:06/NK .NP3A&PPKB/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran.
22. Nota Kesepahaman antara DP3A&PPKB Provinsi Bengkulu dengan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Bengkulu Nomor : 07/NK-DP3A&PPKB/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pers Mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
23. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 243.Mou /R.01-UMB / 2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.

24. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Rejang Lebong Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 26.b / STIPER /RL / III/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
25. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
26. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan AAK Harapan Bangsa Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 014 / BAUK/AAKHB / 03/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
27. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 0353.A/ A-MOU/K.01 STIKES TMS /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
28. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Stikes Bhakti Husada Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor III / STIKES BH / III / 2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
29. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Universitas Dehasen Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 0609/ UNIVED /E-8 / III /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
30. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Akkes Saptta Bakti Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 239.UM/ AKKES SB / III /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
31. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan UPBJJ – Universitas Terbuka Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 697/ UN31.26 / KS /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.

32. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Akademi Farmasi AL-Fatah Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 180/ AKFAR-AF / III /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
33. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Poltekkes Kemenkes Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor HKK.02.05/ 971 /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
34. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 0982/ In, II / HM.01 /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
35. Perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Universitas Bengkulu Nomor 03/PKS-DP3A&PPKB/2017, No DP3A&PPKB/2017 Tanggal 24 Juli 2017.Tentang Pengarus Utamaan Gender Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
36. Perjanjian Kerjasama Kementerian PP dan PA RI dengan LPPM Universitas Bengkulu tentang KKN Thematik OSSOF (One Student Save One Family)
37. Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, yang dasarnya adalah Keppres No. 87 Tahun 2002
38. Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, didasari oleh Keppres No. 88 Tahun 2002;
39. Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dasarnya Keppres No. 59 tahun 2002.
40. Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra No. 25 Tahun 2009.

Adapun Produk Hukum Daerah yang peduli Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No.003.1/567 tahun 2011 tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Bengkulu Selatan

2. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No.441/637 tahun 2011 tentang Pembentukan P2PT2A Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No.460/128 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Bengkulu Selatan
4. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 180.351.IX.2013 tentang Gugus Pengembangan KLA
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.133 tahun 2010 tentang Pembentukan Gugus Tugas TPPO Kabupaten Rejang Lebong
6. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.318.VIII tahun 2012 tentang Pembentukan Pengurus P2TP2A Kabupaten Rejang Lebong
7. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.351.IX tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Pokja Pengembangan KLA Kabupaten Rejang Lebong
8. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.351.IX.2.012 tentang Gugus Pengembangan KLA
9. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.352.IX.2.012 tentang Pembentukan Sekretariat Pengembangan KLA Kabupaten Rejang Lebong
10. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.-376.X tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Rejang Lebong
11. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.030.II tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu P2TP2A Kabupaten Rejang Lebong
12. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.1101.II tahun 2014 tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Rejang Lebong
13. SK Bupati Seluma No.444 tahun 2013 tentang Pembentukan P2TP2A
14. SK Kepala Badan Seluma No.414 tahun 2009 tentang Pembentukan Tim pencatatan dan pelaporan
15. Perda Muko-muko No.32 tahun 2011 tentang Retribusi penggantian KTP dan Akta Capil
16. Keputusan Bupati Muko-muko No.94 tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Muko-muko
17. Keputusan Bupati Muko-muko No.117 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim P2TP2A Kabupaten Muko-muko

18. Keputusan Bupati Muko-muko No.632 tahun 2013 tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Muko-muko tahu 2013-2015
19. Keputusan Bupati Lebong No.180.376.X.tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Lebong
20. Keputusan Bupati Lebong No.02 tahun 2013 tentang Pembentukan P2TP2A Kabupaten Lebong
21. Keputusan Bupati Kepahiang No.68 tahun 2012 tentang Tim P2TP2A di Kabupaten Kepahiang tahun 2012
22. Keputusan Bupati Kepahianag No.359 tahun 2012 tentang Gugus Pengembangan KLA
23. Keputusan Bupati Kepahiang No.360 tahun 2012 tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Kepahiang
24. Keputusan Bupati Kepahiang No.470 tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Kepahiang
25. Perda Bengkulu Tengah No.031.tahun 2010 tentang Akte Kelahiran Gratis.
26. Keputusan Bupati Bengkulu Tengah No.248 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim P2TP2A Korban Kekerasan di Kabupaten Bengkulu Tengah
27. Peraturan Bengkulu Tengah No.01 tahun 2012 tentang Akte Kelahiran Gratis
28. Keputusan Bupati Kaur No.217 tahun 2011 tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Kaur
29. Keputusan Bupati Kaur No.188.4.45 tahun2013 tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Kaur Periode 203-2014
30. Keputusan Bupati kaur No.188.4.45.331.tahun 2013 tentang Forum Anak Kabupaten Kaur
31. Keputusan Bupati Bengkulu Utara No.36 tahun 2014 tentang Pembentukan P2TP2A Kabupaten Bengkulu Utara

B. Kelembagaan

Sedangkan lembaga-lembaga yang telah dibentuk di Provinsi Bengkulu sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- UPPA, adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang berada di sektor kepolisian baik di Polda maupun Polres di tingkat Kabupaten/Kota. Ada 9 UPPA di

Provinsi Bengkulu yang berada di 9 Kabupaten kecuali Kabupaten Bengkulu Tengah yang masih menginduk di Kabupaten Bengkulu Utara dan satu UPPA di Polda Bengkulu dengan jumlah tenaga sesuai lampiran (Tabel 30)

- P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang merupakan unit pelayanan konseling dan merujuk korban kekerasan ke PKT/PPT/RSJKO/BP4. Terdapat 9 UPPA di seluruh kabupaten/Kota kecuali di Kabupaten Kaur yang belum membentuk P2TP2A dan satu P2TP2A di Provinsi Bengkulu dengan data penanggungjawab sesuai lampiran (Tabel 30)
- RPTC, yaitu Rumah Perlindungan Trauma Centre yang merupakan wadah yang menangani korban kekerasan dan menjadi tempat penampungan sementara untuk memulihkan trauma pasca kekerasan yang dialaminya yang merupakan unit pelayanan dibawah Dinas Kesejahteraan Sosial
- LBH, adalah Lembaga Bantuan Hukum yang menerima pengaduan korban kekerasan, mendampingi korban untuk melaporkan dan pembuatan BAP di Kepolisian, mendampingi selama proses penuntutan dan pengadilan dan proses perundingan di luar pengadilan serta merujuk korban kekerasan ke Rumah Perlindungan/WCC/P2TP2A dan sejenisnya.
- PKT, yaitu Pusat Krisis Terpadu yang merupakan tempat pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit Dr. M. Yunus, RSJ Soeprpto, RS Bhayangkara Polda Bengkulu maupun di Puskesmas yang sudah mempunyai tenaga pelayanan kesehatan yang terlatih.
- WCC (*Women's Crisis Centre*) atau Pusat Krisis Perempuan yang memberikan pelayanan psiko-sosial bagi perempuan korban kekerasan, memberikan pelayanan konseling trauma, melakukan pendampingan, mediasi dan merujuk korban ke PKT/PPT/RSJ/BP4.
- Rumah Singgah yaitu tempat penampungan sementara bagi anak-anak terlantar dan korban kekerasan.
- RPSA, yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak yang merupakan tempat perlindungan sementara bagi anak-anak terlantar dan anak-anak korban kekerasan
- Panti Asuhan, yaitu tempat tinggal bagi anak-anak yang tidak mempunyai orangtua termasuk anak-anak yang terlantar

BAB VI

PENUTUP

Dalam Pembangunan, perempuan dan laki-laki harus selalu mendapat akses yang sama, dapat berpartisipasi dan bersama-sama mempunyai kesempatan dalam menetapkan keputusan dan menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama. Melalui profil gender dan anak di harapkan dapat memberikan gambaran peran dan fungsi perempuan dan laki-laki serta kondisi anak di Provinsi Bengkulu di setiap tingkat administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.2016.*IKKA Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2015*. Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.2016.*Profil Perempuan Indonesia 2011-2015*.Jakarta:PT Putra Handayani Mandiri
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.2016.*Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*.Jakarta:PT Putra Handayani Mandiri
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.2017.*Profil Perempuan Indonesia 2011-2015*.Jakarta:PT Putra Handayani Mandiri
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.2017.*Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2015*. Jakarta: Putra Handayani Mandiri
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.2017.*Profil Perempuan Anak Indonesia 2016*.Jakarta:PT Putra Handayani Mandiri
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu 2018.*Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Bengkulu 2017*.Bengkulu
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Bengkulu#Asal_Nama di unduh tanggal 28 Februari 2019
- <https://www.referensibebas.com/2017/09/sejarah-dan-profil-provinsi-bengkulu.html> diunduh tanggal 28 Februari 2019
- <https://weareindostudents.blogspot.com/2016/04/kelompok-usia-produktif-kunci-majunya.html>. Diunduh tanggal 19 Maret 2019
- <http://lipi.go.id/berita/jumlah-usia-produktif-besar-indonesia-berpeluangtingkatkan-produktivitas/15220>. Diunduh tanggal 19 Maret 2019
- <https://glints.com/id/lowongan/pengaruh-usia-produktif-pada-ekonomi/>. Diunduh tanggal 19 Maret 2019
- <https://wakhinuddin.wordpress.com/2010/01/23/pengertian-pendidik-dan-tenaga-kependidikan/> diunduh tanggal 28 Maret 2019
- <https://ilmu-pendidikan.net/pendidikan/peraturan/prinsip-penyelenggaraan-pendidikan> diunduh tanggal 16 April 2019
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1665/ketahanan-ekonomi-perempuan> di unduh tanggal 26 April 2018
- <https://magdalene.co/story/pemberdayaan-perempuan-krusial-bagi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>

<http://blog.unnes.ac.id/yoseph/2015/11/16/sistem-pendidikan-nasional/> di unduh tanggal 16 April 2019

<https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html>

<http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum> diunduh 14 mei 2019

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan In donesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI).2018. *Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2

<https://bengkulu.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab1> diunduh 9 Juli 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia diunduh 9 Juli 2019

<http://www.sumberpengertian.id/pengertian-pertumbuhan-penduduk>

https://id.wikipedia.org/wiki/Tingkat_kelahiran di unduh 16 Juli 2019

<http://lagizi.com/gizi-buruk-pada-anak/>, diunduh 17 juli 2019

<https://idtesis.com/pengertian-lahir-hidup/> diunduh 18 juli 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak diunduh 02 agustus 2019

<http://www.savyamirawcc.com/kekerasan-terhadap-perempuan-ktp/>, diunduh 05 agustus 2019

<https://idtesis.com/pengertian-angka-kematian-neonatal-glosarium/> diunduh 08 agustus 2019

<https://www.academia.edu/10988414/MORTALITAS?auto=download>, diunduh 08 agustus 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak, di unduh 12 agustus 2019

<https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html>, di unduh 27 agustus 2019

L

A

M

P

I

R

A

N

Alamat dan Nomor Lembaga Pengaduan Korban Kekerasan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017

NO	PUSAT LAYANAN	ALAMAT	KONTAK
1.	UPTD PPA Provinsi Bengkulu	Jl.Pembangunan No.13 Padang Harapan Bengkulu	(0736) 21124 081274605822
2.	P2TP2A Kabupaten Seluma	Jl.RA Kartini Pematang Aur Tais	(0736) 91158 085380054183
3.	P2TP2A Kabupaten Rejang Lebong	Jl. S.Sukowati No.26 Curup	(0736) 21587/21588
4.	P2TP2A Kabupaten Muko-muko	Jl. Komplek Perkantoran Pemda	(0737) 71609
5.	P2TP2A Kabupaten Bengkulu Utara	Jl. Laksamana Yos Sudarso No.196 Argamakmur Bengkulu Utara	(0737) 521152
6.	P2TP2A Kabupaten Bengkulu Tengah	Jl. Raya Bengkulu-Curup Km.10 Nakau Talang Empat	085267330873
7.	P2TP2A Kabupaten Kepahiang	Jl. Raya Kepahiang - Curup Komplek Perkantoran Pemerintah	(0732) 391895
8.	P2TP2A Kabupaten Bengkulu Selatan	Jl. Letnan Tukiran No.151 Manna	085268159417
9.	P2TP2A Kota Bengkulu	Jl. Musium No.06 Kota Bengkulu	(0736) 346373 085339800426
10.	UPPA (Polda Bkl)	Jl.Adam Malik	085379433339
11.	UPPA(Polres Bkl)	Jl.A.Yani No.1 Kota Bengkulu	(0736) 21176

NO	PUSAT LAYANAN	ALAMAT	KONTAK
12.	UPPA (Polres Kaur)	Jl.Raya Bengkulu Km.4,8 Bintuhan Kabupaten Kaur	(0739) 61181
13.	UPPA (Polres BS)	Jl.Ltekol Syamsul Bahrun No.1 Manna	(0739) 61181
14.	UPPA (Polres BU)	Jl. Prof.M.Yamin No.418 Argamakmur	(0737) 5210123
15.	UPPA (Polres RL)	Jl. Basuki Rahmat No.08 Curup	(0732) 21440
16.	UPPA (Polres Lebong)	Jl.Raya Muara Aman No.1 Tubei	(0738) 21004
17.	UPPA (Polres Kepahiang)	Jl. Raya Aipda Muan Kepahiang	(0732) 391381
18.	UPPA (Polres Seluma)	Jl.Raya Bengkulu Manna Seluma	(0736) 91003
19.	UPPA (Polres Muko-muko)	Jl. Jend.Sudrman Bandar Ratu Muko-muko	(0737) 71613
20.	PUPA	Jl. Kesehatan 1 No. 06 Anggut Bawah Bengkulu	(0736)23344
21.	WCC Cahaya Perempuan	Jl. Indragiri Padang Harapan Bengkulu	(08127825686)
22.	Yayasan Aisyah	Komplek Muhamaddiyah Kp.Bali Bengkulu	(081377661205)
23.	PKBI	Jl. Bakti Husada	(0736) 25260

Sumber: Dinas P3APKB Provinsi/Kabupaten/Kota

Daftar Organisasi Perempuan Provinsi Bengkulu

No	Nama Organisasi
1	PERIB
2	JALASENASTRI (NAMA ORGANISASI ISTRI ANGKATAN LAUT)
3	BHAYANGKARI (NAMA ORGANISASI ISTRI POLISI)
4	PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
5	DHARMA YUKTI KARTINI
6	ADYAKSA DHARMA KARINI
7	IIDI (IKATAN ISTRI DOKTER INDONESIA)
8	IWABA (IKATAN WANITA PERBANKAN)
9	IKATAN ISTRI KARYAWAN BANK INDONESIA
10	PERWATI (PERSATUAN WANITA REPUBLIK INDONESIA)
11	AL – HIDAYAH
12	AYSYIAH
13	HWK (HIMPUNAN WANITA KARYA)
14	PPKBI (PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA)
15	IWAPI (IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA)
16	WANITA ISLAM
17	PIII (PERSATUAN ISTRI INSINYUR INDONESIA)
18	PPI (PERSATUAN PERAWAT INDONESIA)
19	IBI (IKATAN BIDAN INDONESIA)
20	WANITA KOSGORO
21	IKM (IKATAN KELUARGA MINANG)
22	WKRI (WARGA KRESTEN R.I)
23	TIARA KUSUMA
24	MUSLIMAT NU
25	FORSAT (FORUM SATELIT)
26	FATAYAT (NAMA ORGANISASI ISLAM NU)
27	LBH- UWK (LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA)
28	IKI (IKATAN KELUARGA ISTERI PTP)
29	KERTA WERDATAMA
30	DIAN KAMALA
31	WANITA MUSLIMAT

32	PERSATUAN HJ-HJ
33	IKABOGA (IKATAN AHLI BOGA INDONESIA)
34	IKKBB (IKATAN KELUARGA BANK BENGKULU)
35	BKMT (BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM)
36	KATALIA (ASOSIASI AHLI TATA RIAS PENGANTIN MODIFIKASI DAN MODERN)
37	IKWI (IKATAN KELUARGA WARTAWAN INDONESIA)
38	MKGR (MUSYAWARAH KEKELUARGAAN GOTONG ROYONG)
39	PENWANAS
40	HIMPAUDI (HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
41	DWP. PROVINSI BENGKULU
42	DWP. PEMWILDA
43	DWP. DINAS PERTANIAN
44	DWP. SEKWAN
45	DWP. BPKP PERWAKILAN BENGKULU
46	DWP. DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
47	DWP. BKKBN
48	DWP. DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
49	DWP. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
50	DWP. DP3APPKB
51	DWP. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
52	DWP. DINAS PARIWISATA
53	DWP. DINAS KESEHATAN
54	DWP. DINAS PERHUBUNGAN
55	DWP. DINAS ESDM
56	DWP. BPBD
57	DWP. RSUD Dr. M. YUNUS BENGKULU
58	DWP. RSJKO
59	DWP. DISPENDA
60	DWP. DIKLAT
61	DWP. RRI
62	DWP. PERINDAG
63	DWP. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
64	DWP. PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

65	DWP. DEPAG
66	DWP. KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK
67	DWP. BADAN KETAHANAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
68	DWP. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
69	DWP. UNIB
70	DWP. BPN
71	DWP. BPM
72	DWP. DISPORA
73	DWP. PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
74	DWP. TV RI
75	DWP. BKLH
76	DWP. BKPM
77	DWP. BAKORLU
78	DWP. IAIN BENGKULU
79	DWP. DINAS SOSIAL
80	DWP. DEPARTEMEN AGAMA
81	WCC (WOMEN CRISIS CENTRE) CAHAYA PEREMPUAN
82	PUPA (PEMBERDAYAAN UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK)
83	PAYUNG BESUREK
84	P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK)
85	JPPB (JARINGAN PEREMPUAN PEDULI BENGKULU)
86	PIK - R (PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI REMAJA)
87	CCRR (CENTRA CITRA REMAJA RAFLESIA)
88	KAUKUS PEREMPUAN INDONESIA
89	KPI (KOALISI PEREMPUAN INDONESIA)
90	PKK (PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA)